

**SUBJEKTFIKASI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
DALAM HARIAN UMUM KOMPAS**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Ilmu Komunikasi pada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Oleh

INDRIA JUWITA

17321101

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA**

2021



MOTTO

“Seikhlas-ikhlasnya memberi, setawakal-tawakalnya berharap”

-iin-

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

Mama dan Papa yang telah merubah seikhlas-ikhlasnya doa menjadi nyata

Dan siapapun yang diberi jalan semesta untuk kebersamai proses perjuangan ini

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim...

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah yang tiada daya upaya kecuali dengan pertolongan Nya, yang telah memberikan petunjuk, rahmat, kasih sayang, sebagai tanda kebesaran Nya. Sungguh segala puji bagi Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Tak lupa juga salam serta shalawat kepada Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam, yang telah menjadi uswatun hasanah bagi umat sampai akhir zaman.

Adapun maksud dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai pelengkap pernyataan untuk melengkapi salah satu syarat gelar Sarjana Ilmu Komunikasi di Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. Skripsi berjudul "Subjektifikasi ABK dalam Harian Umum Kompas" ini diharapkan mampu memberikan manfaat rahmatan lil'alamin.

Penulis menyadari bahwa selama proses pengerjaan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankan penulis menghaturkan ucapan terimakasih kepada:

1. Mama dan Papa yang tak henti-hentinya menyertai dalam doa dan dukungan. Terimakasih sudah menjadi yang paling ikhlas dalam membersamai, terimakasih atas sabar dan kepercayaan. Atas izin Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang setelah ini akan ada lebih banyak kabar baik.
2. Holy Rafika Dhona S.I.Kom.,M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih atas bimbingan, kesempatan, kepercayaan, rasa sabar, dan seluruh hal baik yang telah dilakukan hingga banyak hal yang bisa saya pelajari dari ketulusan yang bapak berikan. Tak lupa saya aamiin-kan seluruh kebaikan, keberkahan atas bapak sekeluarga dalam aamiin paling serius.
3. Dr. Subhan Afifi, M.Si. selaku Dosen Penguji Skripsi. Terimakasih atas masukan dan saran selama proses pengujian. Terimakasih atas bimbingan dan kesabaran dalam proses mendidik dan membersamai. Semoga keberkahan dan keridhoan Allah selalu mengiringi kaki, pundak dan tangan dalam kebaikan semesta. Dan untuk apapun yang baik, aamiin paling serius membersamai.

3. Marselina, terimakasih sudah menjadi teman berproses paling sabar. Terimakasih sudah menjadi mata dan telinga dalam banyak hal, lebih dari itu semoga kebaikan selalu melekat pada dirimu. Semoga banyak hal baik menghampiri tali persahabatan ini.

3. Muhammad Bagaskara, entah bagaimana akhir pertemuan kita nanti. Terimakasih sudah ada dalam proses ini. Terimakasih sudah percaya serta menguatkan saat ada banyak hal yang sedang tidak baik-baik saja. Semoga Allah membersamai dan memberkahi langkah kakimu dalam setiap dan seluruh kebaikan yang ada pada semesta. Ku titipkan alfatihah pada hati yang tulus lagi diridhoi.

4. Untuk hati yang lembut lagi penyayang, Denis Kumara Wisnu Pramesti. Terimakasih sudah menjadi tempat pulang di tanah rantau ini. Terimakasih telah menjadi rumah yang selalu siap mendengarkan. Semoga kebaikan selalu membersamaimu.

5. Untuk Ferdy Hasan, selaku teman berproses bersama, terimakasih sudah menjadi tempat mengeluarkan seluruh sambatan, terimakasih banyak atas masukan, nasihat, dan sudut pandang baru yang banyak diberikan. Semoga berkah dan bahagia selalu

6. Seluruh rekan dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata, tiada yang dapat penulis lakukan selain berharap Allah membalas seluruh kebaikan, ketulusan, dan keiklasan semua pihak yang telah banyak membantu dan terlibat dalam proses ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat terbuka untuk segala kritik, masukan, dan saran yang bersifat membangun untuk pengembangan penelitian di masa mendatang. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta dan seisinya. Aamiin Ya Rabbal'alamiin.

Yogyakarta, 25 Februari 2020

Penulis

Indria Juwita

SKRIPSI
SUBJEKTFIKASI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM HARIAN UMUM
KOMPAS

Disusun Oleh

INDRIA JUWITA

17321101

Telah disetujui dosen pembimbing skripsi untuk
diujikan dan dipertahankan di hadapan tim penguji skripsi



Tanggal: 16 Maret 2021

Dosen Pembimbing Skripsi

الإسلام جامعة
الاستقلال

Holy Rafika Dhona, S.I.Kom.,M.A.

NIDN 0512048302

SKRIPSI
SUBJEKTIFIKASI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM HARIAN UMUM
KOMPAS

Disusun Oleh
INDRIA JUWITA
17321101

Telah dipertahankan dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Tanggal: 2 April 2021

Dewan Penguji:

1. **Holy Rafika Dhona, S.I.Kom., M.A**
NIDN 0512048302

(..........)

2. **Dr. Subhan Afifi, M.Si**
NIDN 0528097401

(..........)

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia




Puji Harivanti, S.Sos., M.I.Kom
NIDN 0529098201

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Indria Juwita

Nomor Induk Mahasiswa : 17321101

Melalui surat ini menyatakan bahwa:

1. Selama menyusun skripsi ini saya tidak melakukan tindak pelanggaran akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia.
2. Karena itu, skripsi ini merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya setuju dengan sesungguhnya

Yogyakarta, 2 April 2021

Yang menyatakan



Indria Juwita

17321101

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Motto Dan Persembahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Lembar Persetujuan	Error! Bookmark not defined.
Lembar Pengesahan.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Penelitian Terdahulu.....	7
1.6 Landasan Teori Dan Konsep.....	10
1.7 METODOLOGI.....	15
1.7.5 Unit Analisis.....	17
BAB II	26
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	26
A. Harian Umum Kompas	26
BAB III	31
TEMUAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Temuan	31
1. Pembentukan Subjek Anak Berkebutuhan Khusus	31
2. Pengetahuan Dalam Subjeksi ABK.....	39
B. Pembahasan.....	55
BAB IV	61
PENUTUP	61
A. Simpulan	61

B. Keterbatasan Penelitian.....64
C. Saran/Rekomendasi.....64
DAFTAR PUSTAKA.....65



DAFTAR TABEL

Tabel 2.118



ABSTRAK

Juwita, Indria (2021). 17321101. Subjektifikasi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam Harian Umum Kompas. (Skripsi Sarjana). Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia.

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah istilah yang sejak tahun 2004 muncul untuk mendefinisikan anak yang dianggap berbeda. Di masyarakat masih banyak terjadi diskriminasi terhadap ABK, seperti stigmatisasi, penolakan, dan pemahaman terbelah di masyarakat mengenai siapa ABK. Oleh karena itu penelitian ini adalah mengenai bagaimana ABK direpresentasikan di media Harian Umum Kompas. Representasi atau proses menghadirkan dirumuskan sebagai proses yang ikut mendefinisikan ABK. Sebab teks media pada akhirnya menjadi wacana yang turut mengkonstruksi pengetahuan tentang ABK dan kemudian mengkonstruksi subjek ABK. Artinya representasi itu mengawali bagaimana kemudian hubungan (koneksi) antara ABK dengan realitas lainnya. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah berita tentang ABK dalam Harian Umum Kompas. Pemilihan Harian Umum Kompas sebagai media dikarenakan Kompas merupakan lembaga independen yang belum menunjukkan konsolidasi pada kelompok yang termarginal di masyarakat. Dalam penelitiannya penulis menggunakan teori komunikasi geografi kajian representasi, pengetahuan, subjektivitas dan wacana Foucault yang mana dalam semua konteks teori saling berkaitan satu sama lain. Kajian representasi akan menampakkan bagaimana pengetahuan bekerja, sementara pengetahuan melibatkan unsur subjek yang berperan dalam menciptakan pengetahuan itu sendiri, dan kajian wacana digunakan untuk melihat bagaimana episteme dalam pengetahuan mengenai subjek ABK.

Penelitian menunjukkan bahwa tahun 1968- 2000an istilah ABK tidak ditemukan di dalam Harian Umum Kompas. Pada mulanya ABK dikenal sebagai anak luar biasa, yang mana inilah yang menjadi permulaan pembagian istilah ‘anak luar biasa’ dan ‘anak biasa’. Identitas ini dipisahkan berdasarkan kemampuan anak yang kemudian membelah sekolah. Barulah di tahun 2004 muncul istilah ABK yang dianggap lebih humanis dan general untuk menyebut semua kebutuhan belajar pada anak. Pembicaraan mengenai subjek ABK selalu mengikuti aturan bagaimana sekolah sebagai ruang dibicarakan, sehingga pengetahuan tentang ABK ikut berubah searah dengan perubahan aturan sekolah.

Kata-kunci: Representasi, ruang koneksi, sekolah, ABK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak Bekebutuhan Khusus (ABK) adalah istilah yang sejak tahun 2004 muncul untuk mendefinisikan anak yang dianggap berbeda. Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017, ABK disebut sebagai anak penyandang disabilitas sebagaimana mengacu pada UU No. 8 Tahun 2016 yang mana dalam pendefinisiannya berbunyi

“setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”

Definisi ini menggantikan definisi sebelumnya yang mana ABK lebih dikenali dengan istilah anak cacat dan menganggap bahwa problem utamanya merupakan problem medis, hal ini tertuang pula dalam UU No. 4 Tahun 1997 yang berbunyi

“ setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari : penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental dan penyandang cacat fisik dan mental”

Perubahan UU ini tidaklah terjadi melainkan karena adanya pengetahuan baru yang menganggap bahwa UU ini tidak humanis dan sangat tidak akomodatif terhadap ABK. Kendala kecacatan dalam UU No.4 Tahun 1997 dianggap sebagai problem individu yang dinilai dapat membawa dampak yang meminggirkan dan memarjinalkan ABK dilingkungan sosialnya. Sehingga kelahiran UU No. 8 Tahun 2016 dianggap sebagai bentuk perbaikan dari pemaknaan terhadap istilah kecacatan, yang mana di UU No. 8 Tahun 2016 istilah cacat diganti menjadi istilah disabilitas dan menganggap bahwa problem disabilitas adalah problem interaksi lingkungan.

Perubahan ini tentu melalui mediasi yang cukup panjang, sebab masalah stigma pada kecacatan ABK bukan masalah yang ujug-ujug datang secara tiba-tiba melainkan dibentuk melalui proses sejarah. Sayangnya masalah ini sangat jarang dibicarakan dalam konteks keruangan. Problem ABK selalu melihat ABK sebagai objek kajian yang dicari penanganan dan solusinya tanpa membahas akar masalah dan struktur sejarah subjektifikasi ABK serta wacana didalamnya.

Padahal masalah pada ABK merupakan keterkaitan antara ruang, komunikasi, dan relasi antar manusia. Pemahaman ini diduduki dengan cara melihat bagaimana ruang selalu dihasilkan dari, oleh, dan untuk dalam suatu hubungan komunikasi yang termediasi. Sehingga media menjadi peran penting dalam hal ini, karena media merupakan tempat tersimpannya pengetahuan masyarakat yang merepresentasikan suatu fenomena. Sebagaimana menurut Jacqueline Burgess & John R. Gold media adalah tempat ideologi sebuah kebudayaan bekerja. Artinya praktik kultural keruangan juga terjadi dalam media. Termasuk praktik komunikasi dalam problem subjektifikasi ABK, yang mana media berpengaruh memediasi ruang tersebut.

Misalnya, masalah subjektifitas stigma dan konstruksi sosial pada ABK. Data Harian Umum Kompas menunjukkan bahwa sebanyak 33,4% persepsi mengenai penyebab ABK adalah penyakit keturunan, 23,01% takdir tuhan, 19,29% virus bakteri di otak, bahkan sebesar 0,37% menyebut penyebab ABK adalah gangguan roh halus (Harian Umum Kompas, 16 September 2020)

Artinya masalah ini berbicara mengenai bagaimana ruang dibangun dalam produk sejarah melalui hubungan dan relasi yang saling menempatkan posisi dengan cara mendefinisikan, membagi, mengubah peran, menduduki, dan memproyeksi diri dalam peran lain. Dalam ruang relasi ABK ada proses dimana individu aktif berperan menjadikan dirinya sebagai subjek. Proses ini dilihat dengan cara menggolongkan ABK sebagai subjek yang diberi label tertentu sehingga dianggap berbeda dan harus memisahkan dirinya dengan subjek yang lain.

Problem ini membawa pada asumsi bahwa ada hubungan yang dibangun dengan cara memposisikan relasi sebagai subjek-objek. Sebagai contoh, istilah 'normal' secara tidak langsung akan melahirkan sudut pandang dalam mendefinisikan ketidaknormalan. Perspektif ini kemudian menciptakan praktik yang mensubjektifikasi ABK. Seperti adanya praktik pemisahan dalam ruang sosial, kajian-kajian yang mencoba mengobjektifikasikan ABK, serta label khusus dan persepsi yang diberikan pada ABK.

Hal ini dapat dibuktikan dengan penelitian Mardhatillah (2018). Dalam kesimpulan penelitiannya menyatakan bahwa masih banyak deskriminasi terjadi pada ABK. ABK dianggap sebagai sosok yang tidak berdaya dan sering dikucilkan dari lingkungannya dan sering terjadi pertengkaran karena terjadi penolakan atas dirinya. Selain itu banyak stigma yang tumbuh dimasyarakat mengenai ABK, seperti misalnya orang tua gagal aborsi, gila, tidak normal atau istri

hamil tidak diurus. Tak heran jika banyak terjadi penolakan terhadap ABK yang berujung pada tindakan bullying. Sebagaimana Tempo.co menyebutkan bahwa ABK tiga kali lebih rawan mengalami bullying di sekolah daripada anak pada umumnya (Nilawaty, 11 Juli 2018 dalam Tempo.co).

Masalah ini kemudian dilihat sebagai kendala-kendala ABK yang mulai menjadi agenda penting dan sebelumnya sudah dibahas dalam deklarasi besar dunia seperti Deklarasi Orang dengan Terbelakangan Mental 1971 dan Deklarasi Hak-hak Penyandang cacat tahun 1975. Pada akhirnya pembahasan mengenai ABK terus dibicarakan dari berbagai sudut pandang dan pemahaman untuk mengurangi hambatnya. Tidak hanya hambatan berupa aksesibilitas publik tapi juga hambatan informasi dan komunikasi. Proses ini juga melibatkan interaksi yang dibangun antara hubungan normal dan ketidaknormalan sebagai bentuk bagaimana mekanisme kuasa bekerja. Interaksi ini melahirkan posisi siapa yang menjadi subjek dan siapa yang menjadi objek. Kuasa yang produktif kemudian melegitimasi, mengontrol dan mensubordinasi kepentingan untuk menciptakan kebenaran yang dianggap ilmiah.

Tentu ada banyak kuasa dan pengetahuan yang melatarbelakangi mediasi ABK. Salah satunya Harian Umum Kompas sebagai media komunikasi yang dikenal independen. Namun, dalam proses mediasi ABK, Harian Umum Kompas belum memberikan ruang yang cukup pada ABK dan belum menunjukkan konsolidasi pada kelompok yang termarginal di masyarakat. Pemberitaan Harian Umum Kompas mengenai ABK juga terus menyoroiti isu-isu perbaikan pada sistem pendidikan ABK tanpa memberikan ruang untuk ABK itu sendiri tampil sebagai kediriannya.

Pemilihan surat harian umum Harian Umum Kompas sebagai objek penelitian semata-mata untuk diduduki sebagai praktik wacana, selain itu Harian Umum Kompas juga termasuk dalam surat kabar yang memiliki sejarah berlatar ‘perang kuasa’ yang cukup lama didirikan yaitu sejak tahun 1965.

Disisi lain, pada berita Harian Umum Harian Umum Kompas tahun 60an, tidak ditemukan istilah ABK, melainkan adanya istilah anak luar biasa yang diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, seperti anak debiel, anak imbiciel dan anak terbelakang. Orang-orang berusaha memberikan pelayanan dengan sistem sekolah sendiri yang saat itu disebut Sekolah Luar Biasa. SLB dianggap sebagai ruang yang tepat untuk mengurangi hambatan Anak Luar Biasa. Berita juga

menyebutkan bahwa perlakuan yang baik untuk anak terbelakang adalah dengan sering dibelai, bukan dengan kata-kata.

Pada era yang lain di tahun 2005 muncul istilah ABK yang menyoroti isu kecacatannya dan dilihat sebagai problem sosial yang memiliki pandangan negatif serta mempengaruhi pandangan anak terhadap dirinya. Masalah ini kemudian dianggap sebagai masalah lingkungan yang tidak akomodatif sehingga berita menyebutkan bahwa konsep pendidikan menjadi berubah.

Kemunculan istilah ABK dan perubahan konsep pendidikan ini menimbulkan kecurigaan baru yang menjadi landasan penelitian ini dilakukan, yaitu mengetahui sejauh mana media Harian Umum Kompas berperan mengkonstruksi batasan-batasan perbedaan dan ketidaknormalan ABK demi terciptanya keadilan sosial yang egaliter

Maka berdasarkan masalah ini, akan menarik jika peneliti membahas bagaimana subjektifikasi ABK dibicarakan dalam Harian Umum Kompas. Media dianggap berperan sebagai wacana dan sarana kekuasaan bekerja. Kuasa menurut Foucault erat kaitannya dengan pengetahuan. Foucault menyinggung mengenai bagaimana pengetahuan mempunyai kuasa dan peran yang tidak hanya represif melainkan juga produktif. Pengetahuan berfungsi untuk melanggengkan kekuasaan. Ia akan terus menjadi wacana yang penuh kepentingan lain (Foucault, dalam Kendall dan Wickham, 1999) Sebagai contoh kehadiran istilah berkebutuhan khusus adalah salah satu bentuk konsep bagaimana pengetahuan mencoba mendefinisikan dan menanamkan nilai-nilai atas kelompok marginal kepada agen. Penanaman nilai ideologis melalui pengetahuan hanya akan mengakomodir agen untuk melakukan pendisiplinan yang mengakibatkan objektifikasi, yang kemudian disebarkan menjadi komando perubahan sosial dan kontrol social. Secara tidak langsung dapat menyebabkan terjadinya diskursus, termasuk diskursus lembaga sekolah.

Lebih dari itu, ada banyak penelitian tentang ABK. Penelitian Labuem (2019) meneliti proses berpikir ABK. Penelitian Kostan dan Irwanto (2017) yang menyimpulkan bahwa ABK diasosiasikan sebagai anak yang memiliki kekurangan yang cenderung mempunyai makna negatif dan kerap mengalami perilaku bullying. Serta penelitian lain yang berusaha untuk mendiagnosa karakteristik ABK seperti penelitian Rhomadhona (2017), Desiningrum (2020), dan Nida (2013). Ada juga penelitian Dulisanti (2015) penerimaan sosial terhadap ABK di sekolah inklusi dan juga penelitian Sakinah (2018) yang mencoba membahas *bullying* di sekolah pada ABK.

Keseluruhan proses diagnosa ABK dalam semua penelitian telah menunjukkan bagaimana hubungan sosial ABK dipahami dalam realitas. Pertama, studi pengetahuan tentang ABK selalu dibawah pengaruh studi medis, termasuk psikologi di dalamnya. Kedua, studi ABK selalu masuk dalam konteks disiplin sekolah. Sangat jarang penelitian komunikasi, membahas mengenai bagaimana representasi hubungan keruangan pada ABK. Jikapun melibatkan problem komunikasi, yang dilihat adalah masalah komunikasi individu pada ABK, yaitu bagaimana teknis komunikasi ABK. Tak jarang riset-riset ini membagi teknis komunikasi tersebut dengan cara menggolongkan ABK berdasarkan kecacatannya dilihat dari segi medis. Akibatnya masalah ketidaknormalan ABK terus dibicarakan sebagai tantangan untuk memenuhi kebutuhannya dan haknya dengan monyorot isu-isu keterbatasannya.

Sementara itu di dalam Alquran dijelaskan dalam surah Abasa ayat 1-11 yang mana artinya,

“ Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling. Karena seorang tuna netra telah datang kepadanya. Dan tahukan engkau (Muhammad) barangkali ia ingin meyucikan dirinya (dari dosa). Atau ia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (para pembesar Quraisy), maka engkau (Muhammad) memperhatikan mereka. Padahal tidak ada (cela) atasmu kalau ia tidak menyucikan diri (beriman). Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sementara ia takut kepada Allah, engkau (Muhammad) malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan (begitu). Sungguh ayat/surat itu adalah peringatan...” (Surat ‘Abasa ayat 1-11).

Surat ini adalah bentuk peringatan kepada Nabi Muhammad untuk memuliakan seorang penyandang disabilitas. Sangat jelas bahwa melalui asbabun nuzul ayat ini, islam menjunjung tinggi kesetaraan dan dapat dilihat bagaimana Allah memberi peringatan untuk membangun relasi yang baik dengan memberikan pengajaran terhadap seorang tuna netra dalam ayat tersebut.

1.2 Rumusan masalah

Penelitian ini adalah mengenai bagaimana ABK direpresentasikan di media. Representasi atau proses menghadirkan kembali tidaklah hanya menghadirkan kembali, tetapi dirumuskan sebagai proses yang ikut mendefinisikan ABK. Sebab teks media pada akhirnya menjadi wacana yang turut mengkonstruksi pengetahuan tentang ABK dan kemudian mengkonstruksi subjek ABK. Artinya representasi itu mengawali bagaimana kemudian hubungan (koneksi) antara ABK dengan

realitas lainnya. Oleh karena itu penelitian ini dirumuskan dengan masalah “bagaimana pembentukan subjek ABK dalam harian umum Harian Umum Kompas?”

Subjektifikasi dalam penelitian ini adalah konsep yang dipinjam dari Michel Foucault. Menurut Foucault, pembentukan subjek ini dipengaruhi oleh pengetahuan, dimana pengetahuan diproduksi oleh kuasa. Foucault memandang pengetahuan/kuasa sebagai sesuatu yang produktif dan melegitimasi kebenaran. Maka kehadiran subjek dalam pengetahuan adalah persoalan tentang apa dan siapa yang mengatur berbagai pernyataan, dan cara bagaimana pernyataan itu saling mengatur satu sama lain untuk membentuk seperangkat proposisi yang bisa diterima secara ilmiah, dan oleh karena itu bisa diverifikasi atau di falsifikasi oleh prosedur ilmiah

Oleh karena itu penelitian ini merumuskan masalah “**bagaimana pembentukan subjek ABK dalam Harian Umum Kompas?**” dan pertanyaan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana *subjektifikasi* ABK dalam Harian Umum Kompas?
2. Bagaimana pengetahuan dalam men-*subjeksi* ABK?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui subjektifikasi ABK dalam pemberitaan Harian Umum Kompas
2. Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan dalam subjektifikasi ABK

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1) Sumbangan studi tentang ABK dari perspektif keruangan komunikasi geografi
- 2) Sumbangan studi ABK sehingga istilah muncul dalam praktik wacana

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Dapat mengedukasi masyarakat mengenai Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
- 2) Mengurangi stigma sosial pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
- 3) Menjadi acuan dalam mengembangkan pelayanan pendidikan

1.5 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian mengenai ABK, salah satunya adalah penelitian Susana Labuem (2019). Penelitian ini berjudul proses berpikir Anak Berkebutuhan Khusus (*slow learner*) di kelas inklusi dalam memecahkan masalah matematika dengan metode studi kasus. Penelitian ini dapat menjadi contoh bagaimana otonomi tubuh ABK (proses berpikir) dijadikan sebagai objek penelitian. Hasil penelitian menyebutkan proses berpikir ABK dinilai memiliki masalah keterbatasan daya ingat.

Penelitian kedua, oleh Hashella Kostan dan Irwanto (2017). Penelitian ini membicarakan bagaimana representasi sosial mengenai siswa dengan disabilitas pada siswa non-disabilitas SMP Inklusi di DKI Jakarta. Disimpulkan bahwa siswa disabilitas masih diasosiasikan sebagai siswa yang mempunyai kekurangan dan lebih banyak diasosiasikan dengan kata yang memiliki makna negatif. Temuan juga menunjukkan bahwa siswa disabilitas kerap mengalami bullying. Dalam penelitian ini siswa disabilitas akrab dengan istilah berkebutuhan khusus.

Herfia Romadhona (2017) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mendiagnosa karakteristik ABK menggunakan teknologi khusus yang disebut sebagai sistem pakar dengan metode forward chaining (penalaran suatu masalah kepada solusinya). Hasil penelitian menyebutkan bahwa teknologi ini mempermudah pengguna berkonsultasi tentang karakter ABK tanpa adanya seorang pakar. Peneliti juga menyebutkan bahwa sistem ini mampu memberikan informasi mengenai ciri-ciri ABK yang disertai solusi pembelajaran sesuai karakternya. Sistem ini memiliki akurasi sebesar 80% dan validasi sebesar 100%.

Ada pula penelitian Nida (2013), Ainnayyah, dkk (2019) dan Aprillia (2012) membahas tentang komunikasi dan interaksi ABK. Bagaimana penelitian ini mengatur komunikasi terhadap ABK. Penelitian Nida misalnya, Ia mengelompokkan jenis-jenis komunikasi yang sesuai dengan ABK sesuai hambatannya.

Menurut konsep kekuasaan Foucault, pengetahuan memegang peran penting dalam proses penciptaan kekuasaan. Dalam sudut pandang ilmu komunikasi, pengetahuan bisa dilahirkan melalui ruang yang dibentuk dalam sebuah proses komunikasi. Dimensi ini mengandaikan ruang selalu dihasilkan oleh, untuk, dan dalam sebuah hubungan/koneksi dari komunikasi yang termediasi (Adams dalam Dhona, 2019). Komunikasi tidak semata-mata didefinisikan sebagai proses transmisi pesan, melainkan sebagai proses produksi spasial (Falkheimer & Jansson, 2006;

Adams, 2009; Adams, 2011; Adams & Jansson, 2012). Maka pengetahuan dan kuasa keruangan memiliki hubungan erat dalam proses pembentukan dan pendisiplinan sosial. Salah satunya pendidikan sebagai lembaga sosial pendisiplinan. Dikutip dari jurnal Lukitasari,dkk

“kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia mulai diupayakan sejak dikeluarkannya surat edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No.380/C.C6/MN/2003 pada Januari 2003 kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi seluruh peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Hal ini sejalan dengan Konferensi Dunia di Salamanca tahun 1994 dan Deklarasi Dakar tahun 2000 yang berupaya memberi akomodasi mengenai kebutuhan pendidikan untuk semua (education for all) tanpa memandang ras, agama, dan potensi peserta didik.” (Lukitasari, dkk, 2017).

Sejarah perkembangan sekolah inklusi di Indonesia tidak lepas kaitannya dengan sejarah PLB di Eropa, khususnya di Belanda. Sebelum adanya sekolah inklusi, Indonesia lebih dulu mengenali sistem sekolah terpadu pada tahun 1986 yang mana masih bersifat integrasi, dan terbatas pada tuna netra saja (Bintoro, 2007)

Bintoro melanjutkan bahwa *“Dalam perjalanan selanjutnya terdapat beberapa kendala dalam penyelenggaraan sekolah terpadu, penyebabnya antara lain :*

- a. para pengambil kebijakan pendidikan telah terpasung oleh pola pemikiran tradisional sehingga apa yang telah dilakukan seolah-olah sudah merupakan pilihan terbaik.*
- b. kekeliruan persepsi tentang anak dengan kebutuhan khusus dan PLB*
- c. sikap meremehkan kapasitas anak dengan kebutuhan khusus yang tergolong cacat dalam memberikan kontribusi terhadap kegiatan pendidikan dan kehidupan masyarakat pada umumnya*
- d. kemiskinan ide yang inovatif untuk menciptakan suatu sistem pendidikan yang lebih baik dan manusiawi, dan*
- e. kemiskinan hasil-hasil penelitian yang diselenggarakan secara sinambung untuk memperbaiki pendidikan.”*

Penyebab inilah yang kemudian melahirkan istilah baru yaitu pendidikan inklusi yang mulai diwacanakan dan terus bergulir hingga 2001. Selama prosesnya kelahiran pendidikan inklusi tidak lepas dari kebijakan pemerintah melalui Direktorat Pendidikan Dasar yang pada tahun 1994 yang giat menyelenggarakan pelatihan. Sehingga mulai dari sini konsep PLB mulai dipandang tidak identik dengan SLB (Bintoro, 2007)

Namun dalam proses pelaksanaannya guru pembimbing khusus (GPK) sebagai pilar pendidikan inklusi belum sepenuhnya maksimal berperan sebagai GPK. Penelitian oleh Zakia, 2015 menyatakan bahwa

“GPK masih bertugas seperti guru pada umumnya sehingga pemenuhan kebutuhan ABK pada pendidikan inklusi terutama pada program khususnya tidak terpenuhi. ABK masih dianggap sebagai pengganggu dalam proses kelancaran pembelajaran, hal tersebut berakibat pada penolakan penerimaan ABK pada sekolah inklusi” (Zakia, 2015).

Kekeliruan persepsi atas ABK yang menjadi salah satu kendala dalam proses pelaksanaan sekolah inklusi menjadi kaitan penting dalam penelitian ini. Heidegger meyakini bahwa pemikiran dan tindakan manusia adalah bentukan dari konteks. Sementara Canguilhem melengkapi bahwa pengetahuan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Maka Foucault, menyimpulkan bahwa pertama, dengan pengetahuannya sendiri manusia merupakan makhluk yang dibatasi oleh lingkungannya. Kedua, rasionalitas dan kebenaran selalu berubah sepanjang sejarah. (Danaher, 2001)

Sementara untuk kendala pada poin a yaitu: “para pengambil kebijakan pendidikan telah terpasung oleh pola pemikiran tradisional sehingga apa yang telah dilakukan seolah-olah sudah merupakan pilihan terbaik.” membawa pada asumsi bahwa “*apapun bentuk pengetahuan, rasionalitas dan kebenaran tidak akan pernah bisa ditemukan maknanya jika tidak disandingkan dengan makna lain dalam relasinya.*” Dengan kata lain sesuatu dapat dikatakan benar, jika disandingkan dengan kesalahan dan jadilah pengetahuan mengenai benar atau salah. Sebagai contoh untuk memahami makna kenormalan maka seseorang harus memahami juga makna ketidaknormalan dan adanya pola pemikiran yang terpasung seperti ini adalah hasil bentukan sejarah subjektifikasi ABK.

Penelitian diatas hanya fokus pada usaha memahami ABK dari berbagai sudut pandang keterbatasannya sebagai individu. Penelitian-penelitian ini berusaha untuk mengatasi hambatan ABK dengan praktik pengetahuan yang diciptakan untuk mensubjektifikasi ABK, termasuk didalamnya praktik perubahan perkembangan pendidikan dari sistem eksklusi menuju inklusi yang dianggap sebagai perwujudan non diskriminasi. Sementara penelitian yang akan ditulis oleh peneliti tidak berfokus pada keterbatasan ABK, tetapi bagaimana keterbatasan ABK dibicarakan dalam media Harian Umum Kompas dan hubungannya dengan kelahiran ruang sosial. Dalam hal ini peneliti memilih Harian Umum Kompas sebagai objek penelitian. Kehadiran media Harian

Umum Kompas memediasi proses subjektifikasi terhadap ABK. Peneliti berusaha untuk melihat bagaimana subjektifikasi ABK muncul dan dikonstruksi. Sehingga pembaca dapat mengetahui bagaimana pemahaman terhadap ABK menjadi seperti sekarang. Selanjutnya yang membedakan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah adanya unsur ranah komunikasi ruang. Dalam hal ini ruang dibentuk melalui sebuah hubungan yang termediasi.

1.6 Landasan Teori dan Konsep

1.6.1 Representasi dan Ruang Koneksi

Representasi merupakan bidang kaji komunikasi geografi yang menjelaskan bahwa komunikasi dibentuk melalui ruang yang direpresentasikan oleh media yang menunjukkan bagaimana ruang dulu dan ruang sekarang. Jansson menyebutnya sebagai mediasi ruang (*mediation of space*). Kajian ini menampilkan bahasan-bahasan bagaimana komunikasi dikonstruksi dan dibicarakan melalui media atau tindakan komunikasi. Tindakan komunikasi ini dapat juga termasuk hubungan atau relasi yang dibangun dalam ruang koneksi antar individu. Semisal komunikasi antara orang tuli dan yang tidak tuli. Ruang koneksi ini memang terkesan abstrak. Tetapi kajian representasi akan menampilkan bagaimana ruang ini memberi pengaruh yang signifikan terhadap subjek yang terlibat.

Ruang memberi pengaruh pada pola dan tingkah laku sosial masyarakat dalam berkomunikasi. Pemilihan ruang yang tepat menyebabkan komunikasi menjadi semakin efektif sekaligus memberikan banyak dampak, baik positif maupun negatif, semisal adanya ruang inklusi adalah suatu sarana yang memfasilitasi kebutuhan ABK dan disabilitas secara tidak langsung, tetapi secara bersamaan hadirnya ruang ini justru menciptakan pemaknaan tersendiri yang mengeksklusikan ABK dengan cara pandang berbeda. Sehingga hadirnya ruang ini memberikan dampak dan mengubah suatu nilai yang awalnya dianggap fungsional menjadi sumber daya yang memiliki pengaruh sosial. Dengan kata lain ruang sebagai suatu media adalah tempat sebuah ideologi kebudayaan bekerja. Dan ini direpresentasikan oleh media yang turut merepresentasikan bagaimana kebudayaan tersebut mengkonstruksi tindakan dan pola komunikasi manusia. Komunikasi dalam hal ini memiliki peran yang bekerja sebagai sesuatu yang memberikan legitimasi serta batasan-batasan dalam mendefinisikan otoritasnya dan media menjadi alat untuk melihat peran tersebut.

Ruang dan tempat tidak datang dengan sendirinya melainkan hasil konstruksi dari pengetahuan dan pengalaman. Komunikasi tidak hanya memediasi ruang dan tempat lebih dari itu komunikasi merupakan bagian dari struktur dialektika antara komunikasi sebagai konteks atau komunikasi sebagai isi. Karena komunikasi memberikan batasan ruang dan ruang mempengaruhi komunikasi maka batasan antara ruang dan komunikasi menjadi ambigu, sehingga komunikasi harus lebih memberikan efek daripada ruang itu sendiri. Efek yang dimaksud adalah perubahan konteks yang bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Konteks komunikasi lah yang berperan dalam mendefinisikan dan memaknai ruang karena secara praktis manusia selalu dihadapkan pada perang perebutan ruang, lalu konteks komunikasi disini digunakan sebagai solusi, dengan kata lain bagaimana komunikasi itu sendiri menjadi solusi bagi batas-batas keruangan antara 'kenormalan' dan ketidaknormalan?

Maka penelitian ini menggunakan konsep ruang koneksi Paul C. Adam (2009) dan mediasi ruang Jansson yang mana membahas bagaimana representasi ruang koneksi dikonstruksi untuk menjalin sebuah proses komunikasi. Dalam komunikasi geografi, komunikasi didefinisikan tidak semata-mata sebagai proses transmisi pesan, melainkan sebagai proses produksi spasial (Falkheimer & Jansson, 2006; Adams, 2009; Adams, 2011; Adams & Jansson, 2012). Dengan kata lain bagaimana komunikasi menghasilkan ruang dan sebaliknya, bagaimana ruang menghasilkan komunikasi (Falkheimer & Jansson, 2006).

Pada dimensi ruang koneksi, ruang diandaikan sebagai mediasi yang digunakan pada jenis komunikasi yang berbeda cara penyampaian. Seperti halnya komunikasi antara orang tuli dan non-tuli memiliki cara penyampaian yang berbeda. Hal tersebut membentuk sistem ruang inklusi dan eksklusif orang tuli melalui bahasa, institusi dan teknologi. Ruang institusi contohnya sekolah, ruang bahasa contohnya bahasa isyarat, dan teknologi seperti alat bantu dengar.

1.6.2 Pengetahuan

Foucault dalam karyanya *power/knowledge* (1972:122) menyatakan bahwa pengetahuan dan kuasa saling berhubungan untuk melegitimasi kebenaran.

“Kebenaran adalah persoalan tentang apa yang mengatur berbagai pernyataan, dan cara bagaimana pernyataan itu saling mengatur satu sama lain untuk membentuk seperangkat proposisi yang bisa diterima secara ilmiah, dan oleh karena itu bisa diverifikasi atau di falsifikasi oleh prosedur ilmiah. Singkatnya, ada permasalahan rezim, permasalahan

pernyataan politik dan ilmiah. Kebenaran adalah hasil dari pemahaman antara kuasa dan pengetahuan.“

Bagi Foucault (1972) kekuasaan bersifat cair, menyebar sehingga ia tidak mutlak pada satu kebenaran, tidak dapat dilokalisasi. Ia merupakan suatu tatanan disiplin dan dihubungkan dengan relasi atau jaringan yang memberi struktur kegiatan-kegiatan, tidak represif melainkan produktif.

Kuasa yang produktif lahir melalui pengetahuan yang membentuk posisi antara subjek dan objek. Foucault menyebutkannya sebagai “*a made of action upon actions of others*”. Dengan kata lain subjek diatur dengan subjek yang lain. Bagi Foucault kuasa dan pengetahuan bertitik tolak pada persoalan subjek, yang mana dalam prosesnya selalu merujuk pada pembentukan diri manusia sebagai subjek yang etis. (Kendall & Wickham, dalam Dhona 2019)

Sebagai contoh bagaimana ABK dalam relasi sosialnya diatur dalam sistem pendidikan, baik itu Pendidikan Luar Biasa maupun Pendidikan Inklusi. Intitusi ini akan menjadi faktor yang mempengaruhi pandangan terhadap ABK. Jika dimaknai maka pengetahuan masyarakat mengenai kenormalan adalah hasil pemaknaan terhadap ketidaknormalan. Maka wacana yang bekerja membentuk perilaku masyarakat melalui pengetahuan mereka mengenai ketidaknormalan, seperti apakah ABK dipandang? Dan kuasa menjadi faktor yang mempengaruhi pandangan tersebut. Foucault memperlihatkan adanya kekuasaan yang terselubung dalam pelbagai institusi dan lembaga

Foucault juga berbicara mengenai pergeseran bentuk penghukuman yang berfokus pada relasi kekuasaan-pengetahuan “*apapun bentuk pengetahuan, rasionalitas dan kebenaran tidak akan pernah bisa ditemukan maknanya jika tidak disandingkan dengan makna lain dalam relasinya.*” Dengan kata lain sesuatu dapat dikatakan benar, jika disandingkan dengan kesalahan dan jadilah pengetahuan mengenai benar atau salah. Sebagaimana ketidaknormalan lahir karena adanya istilah normal.

Selain itu, posisi subjek dalam kuasa yang produktif bersifat dinamis. Ia berproses dan menyebar. Kelahiran subjek dalam satu pengetahuan akan membentuk kelahiran objek pengetahuan disaat yang bersamaan.

1.6.3 Subjektifikasi

Foucault dalam Rabinow (1984:7) melihat sesuatu sebagai subjek ketika adanya kesadaran akan etika kebebasan dalam diri individu. Dengan kata lain menemukan dirinya sebagai subjek etis. Foucault juga menganalisis bagaimana subjek diamati sebagai objek, bagaimana manusia berpikir dan bertindak dalam tiap era berpikir sehingga menunjukkan bahwa rasionalitas manusia sepanjang sejarah adalah berpikir. Foucault, dalam Rabinow (1984:7) mengungkapkan tiga jenis objektivikasi subjek dengan istilah lain bagaimana manusia (diperlakukan) sebagai objek. Pertama, praktik-praktik eksklusi (pemisahan). Praktik ini dianggap sebagai bentuk kerja untuk mendominasi. Biasa dilakukan terhadap orang sakit (fisik atau mental), kelahiran label kegilaan, kelainan, penyakit, orang malang. Sebagai contoh Anak Berkebutuhan Khusus yang dianggap sebagai penyakit atau kecacatan. Hal ini diperkuat lagi oleh media dengan istilah berkelainan, penyandang cacat yang kemudian memberi pandangan ketidakmampuan, bodoh dan dungu. Kemudian, pada era lain ketika masalah ABK dapat diatasi dengan mendirikan sekolah, melakukan terapi pengobatan, dan perbaikan sistem pedagogi pendidikan sebagai “panjangan tangan” pemerintah serta semua penanganan terhadap ABK, dapat terlihat jelas bahwa ABK benar-benar dilihat sebagai objek yang tidak sehat, tidak normal, bodoh dan oleh karena itu harus dididik dalam pendidikan khusus, disehatkan dengan melakukan terapi-terapi dan penggunaan alat, dan dinormalkan sesuai dengan nilai-nilai kenormalan subjek.

Dari semua penjelasan diatas sesungguhnya menunjukkan bagaimana orang-orang menggunakan istilah-istilah ketidaknormalan dan mendefinisikannya menjadi ruang baru yang menghadirkan praktik eksklusi khusus dalam perspektif ruang dan juga perspektif sosial. Aturan-aturan dan pengetahuan mengenai ABK diatur oleh kuasa dalam institusi dan lembaga sosial, salah satunya media.

Kedua, manusia dipandang sebagai subjek yang diobjektifikasi oleh pengetahuan. Banyaknya ilmu pengetahuan yang berkembang dan melahirkan banyak klasifikasi menempatkan manusia sebagai objek utama bahasan-bahasan ilmiah. Contoh, manusia sebagai makhluk yang berkomunikasi, hidup, dan bekerja ditempatkan sebagai objek dalam ilmu filologi, linguistik dan grammaire generale. Pengetahuan menjadi landasan bagi manusia bertindak dan memahami sesuatu. Melalui pengetahuan manusia dalam melegitimasi kebenaran alih-alih menyebutnya ‘kebenaran ilmiah’ yang tak jarang dibuktikan dengan konsensus.

Ketiga, menurut Foucault cara manusia menerima atau menjadikan dirinya sebagai subjek atau subjektifikasi adalah ketika manusia mulai sadar dan berbicara tentang etika kebebasan dalam yang ada dalam dirinya sendiri (Foucault, dalam Kebung, 2018: 39-41)

Paul Rabinow berusaha menjelaskan bagaimana subjek dibentuk dengan cara mengobjektifikasi subjek:

1. *dividing practices* : adanya proses pemisahan, pengklasifikasian, pengelompokan yang bermaksud untuk mengetahui golongan-golongan dan menjadikan individu sebagai objek pengetahuan dengan cara meminggirkan dan memarjinalkan mereka. Contoh kelahiran institusi modern seperti rumah sakit, klinik, sekolah, penjara dan kebangkitan psikiatri. Institusi ini mengobjektifikasi individu sekaligus memisahkan (mengeksklusikan) mereka dengan golongan-golongan mereka sendiri maupun orang lain diluar golongan mereka.

2. *scientific classification* : setelah adanya proses pemisahan, individu kemudian dipahami dengan cara meletakkan dirinya dalam pengetahuan ilmiah (sains). Misalnya ABK dalam ranah linguistik dijelaskan sebagai “subjek yang sulit interaksi”, dalam ranah biologi, subjek ABK sebagai “gangguan saraf”. Foucault juga menjelaskan bagaimana wacana kehidupan, tenaga kerja, dan bahasa disusun dalam disiplin ilmu sehingga dengan cara ini seseorang mencapai otonomi internal dan koherensi yang tinggi. Disiplin kehidupan, tenaga kerja, dan bahasa cenderung dipandang berhubungan dengan kehidupan sosial manusia universal dalam memurnikan diri mereka sendiri.

Contohnya, konsep ABK yang dianggap sebagai penyakit mental, dimana mereka perlu dirawat dan dipisah agar tidak menjadi gangguan di masyarakat. Kemudian kehadiran dokter, psikiater, membuat ABK seperti objek yang dikaji penawarnya. Mereka dipandang dengan “*medical gaze*.” Konsep ini mengurung manusia menjadi subjek yang dipilah-pilah dan dikategorikan.

3. *subjectification* : yaitu proses individu menjadikan dirinya sebagai subjek. Dimana individu mendapatkan pengakuan berupa otoritas dalam relasi sosialnya. Pengakuan ini menyebabkan seseorang tampil sebagai kediriannya.

1.7 METODOLOGI

1.7.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan strategi penelitian analisis wacana subjektifikasi ABK dalam harian umum Harian Umum Kompas. Menurut Denzin dan Lincoln (2009:5) penelitian kualitatif adalah bentuk penelitian yang meneliti sesuatu dalam konteks ilmiah dan berusaha menafsirkan fenomena yang terjadi dengan pendekatan yang bersifat interpretatif terhadap objek kajiannya. Sehingga penafsiran makna terhadap suatu objek penelitian dilekatkan oleh manusia. Kualitatif berfokus pada kualitas atau kedalaman menganalisis data. Sehingga makna dikaji secara ketat dan mengedepankan realitas sosial yang terkonstruksi, terdapat hubungan erat antara peneliti dengan subjek yang diteliti (Denzin dan Lincoln, 2009:5).

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis wacana Foucault. Analisis wacana Foucault adalah bentuk analisis yang menyebar. Ia menggabungkan tiga komponen penting yang saling berkaitan yaitu, analisis statemen, analisis sejarah, dan analisis kuasa (Foucault, 2004). Maka dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk menemukan bagaimana keterhubungan antara sejarah, statemen, dan relasi kuasa dalam mensubjeksi ABK yang kemudian merepresentasikan ruang koneksi.

1.7.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Berdasarkan pertimbangan peneliti, penelitian akan dilaksanakan dalam waktu empat bulan dimulai dari Desember 2020 dan diperkirakan selesai pada bulan April 2021.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Yogyakarta dengan mengumpulkan data teks Harian Umum Harian Umum Kompas di kantor Harian Umum Kompas, Yogyakarta

1.7.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara peneliti memperoleh dan mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan sebanyak 24 berita Harian Umum Kompas yang diambil langsung dari

arsip data Kantor Harian Umum Kompas, Yogyakarta. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode, antara lain :

a. Metode Kepustakaan

Kepustakaan adalah metode untuk mencari informasi dan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam hal ini menganalisis teks berita harian umum Harian Umum Kompas yang dapat dijadikan dasar pemecahan masalah yang dihadapi.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses untuk memperoleh keterangan dari informan untuk tujuan penelitian sebagai data tambahan. Dalam hal ini wawancara dilakukan secara online, melalui media sosial. Narasumber penelitian adalah Tolhas Damanik selaku orang yang berhubungan langsung dengan ABK.

1.7.4 Metode Analisis data

Peneliti menggunakan analisis wacana Foucault yang erat kaitannya dengan sejarah, statemen, pengetahuan, episteme, dan kekuasaan. Foucault (dalam Dhona, 2020: 201) menghubungkan istilah episteme (ruang/batas persebaran sebuah wacana) dengan konsepnya tentang kekuasaan dan pengetahuan. Adapun yang membedakan wacana foucauldian dengan yang non foucauldian adalah analisis sejarah yang menjadi statemen penting bagi sebuah kedirian objek. Sebab bagi Foucault wacana adalah sesuatu yang dalam relasinya tidak lepas dari unsur yang dihubungkan oleh subjek. Adanya statemen digunakan untuk menunjukkan bagaimana posisi subjek dalam statemen, bagaimana objek diposisikan dalam statemen, konsep yang membuat adanya hierarki dan subjek dalam statemen dan strategi yang digunakan ketika mengeluarkan statemen.

Langkah pertama yang penulis lakukan adalah menemukan “arsip” yang ditempuh dengan mengumpulkan seluruh data pemberitaan Harian Umum Kompas mengenai ABK. Data ini diambil bertujuan untuk menganalisis konsep kemunculan ABK dan bagaimana ABK dibicarakan pada berita, artikel, atau apapun yang berhubungan dengan ABK di Harian Umum Kompas

Langkah kedua menganalisis seluruh kumpulan arsip dan melihat bagaimana istilah-istilah pada ABK disematkan, yang kemudian mengelompokkan dan memisahkan individu ABK dengan cara meminggirkan dan memarjinalkan mereka. Saya menganalisis dengan cara melihat tematik, *dividing order, classification saintific, subjectivaciton*

Langkah ketiga penulis mulai menganalisis kuasa-pengetahuan. Bagaimana individu dibicarakan sebagai objek pengetahuan (sains) dalam statemen kemudian melihat keteraturan dari statemen ini dalam mengkonsepkan pengetahuan.

Langkah keempat penulis mulai menganalisis subjek dari kuasa-pengetahuan. Bagaimana individu memposisikan dirinya melalui statemen kemudian menjadikan ia tampil sebagai subjek etis.

Keempat langkah ini untuk melihat bagaimana hubungan sebuah statemen terhubung dan bermakna atau berfungsi. Maka dari sudut pandang ini wacana adalah serangkaian formasi yang berusaha dikontrol oleh subjek yang memiliki label ‘penguasa/dominan’ dan bersifat disipliner.

Yang perlu digaris bawahi analisis statemen adalah analisis yang menyejarah. Ia menghubungkan seluruh fenomena sejarah yang dianggap saling berkaitan. Maka sifat statemen adalah sejarah yang berkontinyu dan dilihat keberulngannya serta ketidakkonsistenan statemen.

Penelitian ini tidak berusaha melihat kepentingan media massa dalam memproduksi wacana. Melainkan mendudukan teks ‘Harian Umum Kompas’ sebagai praktik dari wacana. Praktik tersebut adalah “... suatu tempat dimana sesuatu dikatakan dan dilakukan; aturan-aturan digambarkan; alasan-alasan diberikan; sehingga sesuatu yang direncanakan dengan yang dianggap terberi bertemu lalu terhubung satu dengan lainnya” (Foucault dalam Flyyn, 2005:34)

1.7.5 Unit Analisis

Perlu dipahami bahwa batasan penelitian ini adalah konstruksi ABK di Harian Umum Kompas. Ia berfokus pada bagaimana Harian Umum Kompas mensubjektifikasikan ABK. Karena kecurigaan peneliti adalah pemahaman tentang ABK bergantung pada pengetahuan masyarakat, dan pengetahuan itu tersimpan di media. Sehingga output lapangan seperti adanya praktik sekolah ABK sangat berkorelasi dengan bagaimana media Harian Umum Kompas mengkonstruksi ABK.

Selain itu penelitian ini berusaha untuk menemukan bagaimana keterhubungan antara sejarah, statemen, dan relasi kuasa dalam mengkonstruksi ABK.

TABEL 2.1

UNIT ANALISIS SUBJEKTFIKASI ABK

NO	EDISI	JUDUL	ISI
1	18 November 1968	Simposium Pendidikan Luar Biasa	“Simposium Pendidikan Luar Biasa bagi anak2 Lambat Beladjar dan lemah ingatan seluruh Djawa Tengah, dibuka hari Djum’at sampai Sabtu di Solo. Beberapa ahli memberikan prasaran2 megenai psikologi, medis, sosial, dan pedagogik. Djuga diadakan kuliah kerdja“
2	4 Juli 1970	Inilah Tugas Sekolah Luar Biasa	<p>“... anak-anak menggunakan mata dan tangannya bersama. Umpamanja dengan memberinja dua buah besek, satu berwarna biru, satu merah. Diberi juga tutup botol berwarna biru dan merah. Seperti sedang bermain2, sianak diminta memasukkan tutup botol merah kebesek merah dan tutup botol biru kebesek biru. Permainan ini tidak boleh lebih dari 15 menit. Mereka beladjar membedakan bentuk mengambil benda2 jang halus dsb”</p> <p>“anak terbelakang sebaiknja sering dibelai”</p> <p>“anak debiel dan imbeciel ada sekolah tersendiri di Djakarta”</p> <p>“Ada matjam2 hal jang bisa menjebabkan seseorang anak menjadi imbeciel mungkin ketika dalam kandungan ibunja diserang German Measleef seperti Putri Christine dari negeri Belanda, mungkin karena cromosomnja lebih satu sehingga djadi anak mongoloid, mungkin karena pengaruh obat2an sematjam thalidomide, mungkin karena pada saat dilahirkan kekurangan zat asam atau karena sang penolong kelahiran terlalu kuat mendjepit kepalanja, mungkin djuga karena kanak2 itu mendapatkan kedjelakaan (djatuh, kedjelakaan mobil dsb), terserang meningitis dsb”</p>

3	18 Agustus 1971	1000 Anak Tuna Mental	“hendaknja jajaran2 jang bergerak dibidang pendidikan djuga memperhatikan anak-anak tunamental itu. Ia mohon pada pemerintah pusat agar sektor Pendidikan Luar Biasa tak dilupakan dalam daftar isian projek (dip)..”
	21 Januari 1971	Sekolah Untuk Buta, Tuli, Bisu	“Kota Tjirebon telah mulai merintis pembukaan Sekolah Luar Biasa bagi mereka jang bisu, buta, tuli, idiot serta lainnya”
	24 Juni 1974	Menurut Menteri P&K: Dibidang Pendidikan Luar Biasa, Peranan Swasta Lebih Menonjol	“Hal ini dipertegas kembali dengan adanya pernyataan Menteri P & K dalam simposium Pendidikan Luar Biasa, beliau menyatakan bahwa peranan swasta lebih menonjol dibidang Pendidikan Luar Biasa sehingga hal ini dianggap penting dan dirumuskanlah tujuan simposium yang pertama yaitu melakukan identifikasi sekitar situasi Pendidikan Luar Biasa, dan yang kedua merumuskan hubungan kerjasama diantara pihak pemerintah dan swasta”
4	17 Desember 1975	Sekolah Luar Biasa Tunetra Di Bali	“... Karena itu para guru mendaftarkan muridnya yang cacat mata ini dalam pertandingan 17 Agustus 1973. Tetapi sayang panitia menolaknya bertanding dengan orang yang tak melihat dirasa tak seimbang. Bila menang tidak lucu, bila kalah dengan orang buta tambah enggak lucu lagi”
5	11 Agustus 1977	Gedung Sekolah Baru Untuk Anak-Anak Imbecile	“bulan Maret tahun lalu yayasan ini memperoleh hak guna atas tanah sumbangan seorang dermawan sekitar 2475 m2 di Desa Trogong dan oleh DKI dibangun sebuah sekolah terdiri dari 8 ruang kelas, 1 dapur, 3 ruang tata usaha, kamar dokter dan kamar psikologi..”
	1 September 1978	Kerjasama Indonesia-Belgia Dalam Melatih Guru Anak Cacat	“menurut menteri, mereka anak cacat itu adalah manusia juga, sehingga berhak menikmati hasil pembangunan teknologi dan ilmu pengetahuan.”
6	19 Maret 1980	Murid Tunanetra Bisa Naik Kelas Tiga Kali Setahun	“Yanti Darmayanti 12 tahun depan kanan murid tunanetra yang mengikuti sistem pendidikan terpadu. Ia berhasil naik kelas 3 kali dalam setahun kini ia duduk di kelas IV SD III Cihaurgeulis Bandung”

7	24 Maret 1980	Bukan Tunanetra	<p>“... kami mohon dengan hormat dan sangat diharapkan agar berita itu (keterangan dibawah gambar di RALAT, yaitu dengan mengganti kata TUNENETRA menjadi KURANG PENGELIHATAN”</p>
8	12 Juni 1995	Wajib Belajar Bagi Anak Cacat Tidak Mudah Dilaksanakan	<p>“akan tetapi di Jakarta saja masih ada kepala sekolah yang tidak mau susah dan keberatan ada anak cacat di sekolahnya. Sebagai seorang yang intelek mereka seharusnya mengerti dan tidak bersikap seperti itu”</p> <p>“... kurikulum harus disiapkan agar mereka dapat bekerja mandiri dan tidak menjadi beban orang lain. Kurikulum bagi penyandang cacat juga harus memberikan ketrampilan yang memadai sehingga produk yang dihasilkan penyandang cacat tidak kalah mutunya dibandingkan produk yang dihasilkan masyarakat normal”</p>
9	7 Juli 1998	Kunci Keberhasilan Penyembuhan Autisme	<p>“penyandang autisme bersikap acuh tak acuh bila diajak bicara atau bergurau. Ia seakan-akan menolak semua usaha interaksi dari orang lain, termasuk dari ibunya. Ia lebih suka dibiarkan main sendiri, dan melakukan sebuah perbuatan yang tidak lazim secara berulang-ulang”</p> <p>“Autisme dilihat sebagai gangguan perkembangan yang belum diketahui penyebabnya...para ahli otak menunjukkan adanya keganjilan pada sistem limbik, dan kurangnya jumlah sel pada lobus parietalis di otak. Akibatnya, terjadi kekacauan sistem di otak”</p> <p>“tidak cukup dan tidak akan berhasil bila kita hanya bergantung pada ahli terapi saja. Orang tua juga harus terjun. Kalau bisa 24 jam sehari. Kalau ahli terapi waktunya sangat terbatas. Anak harus dilatih terus-menerus. Kedengarannya keji. Tetapi ya harus begitu itu”</p>
10	17 Juli 2000	Wapres : Penyandang Cacat Sering Terabaikan	<p>“mereka tidak perlu bergantung atau menggantungkan diri kepada orang lain karena keadaannya, seandainya telah tersedia</p>

			perangkat atau peralatan yang memadai untuk mereka digunakan. Hal ini sangat disayangkan karena di negara maju telah dapat dilakukan dengan baik”
	3 November 2002	Jangan Memberi “Label” Pada Anak	<p>“... label-label tertentu pada anak sangat merugikan, meskipun anak itu tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara dengan suara, tidak bisa melihat dengan mata, memiliki cacat fisik atau mental, atau keduanya, juga bila anak bermasalah dengan kecerdasan dan tingkah lakunya. Selain melanggar hak anak, pemberian label-label seperti itu juga melanggar etika”</p> <p>“kekurangan pada anak tidak boleh dilihat sebagai hukuman dari Tuhan. Tuhan memberikan kemampuan berbeda-beda kepada setiap anak. Ada yang segini, ada yang segitu, kita harus mengembangkan karunia yang diberikan kepada anak kita, berapa pun besarnya. Bagaimanapun kondisi anak kita, mereka sangat bernilai”</p>
11	7 Februari 2005	Sikap Sosial, Hambatan Utama Anak Berkebutuhan Khusus	<p>“selama ada alat khusus, mereka dapat mengatasi hambatan kecacatan itu. Yang sulit hambatan sosial. Hambatan dari dalam diri anak itu sendiri pun umumnya juga disebabkan pandangan sosial yang negatif terhadap dirinya”</p> <p>“selama ini, orang membuat dikotomi antara normal dan cacat atau berkebutuhan khusus. Padahal, warga berkebutuhan khusus adalah bagian dari masyarakat juga. Bahkan, terkadang orang tua mereka juga tidak rela melepaskan anaknya ke masyarakat-termasuk lembaga pendidikan umum-karena kekhawatiran”</p> <p>“dengan dasar itulah, secara filosofis pendidikan inklusi yang mengajar semua anak secara integral dianjurkan. Dalam artian Anak Berkebutuhan Khusus belajar bersama anak lainnya di sekolah umum. Namun, pendidikan inklusi juga disesuaikan dengan kondisi anak dan kebutuhannya”</p>

12	4 Mei 2005	Komitmen Pendidikan Untuk Semua	“dalam acara perayaan hari pendidikan nasional yang dihadiri menteri pendidikan dengan meluncurkan toolkit pendidikan inklusif yang berisi tujuh buah buku”
	28 September 2005	Saatnya Kikis Kendala Budaya	“Demi pemerataan kesempatan pendidikan pada semua anak usia sekolah termasuk anak berkelainan fisik dan mental, pendidikan inklusi diyakini sebagai solusi jitu di samping terus mengembangkan Sekolah Luar Biasa. Sudah saatnya paradigma sosial budaya yang menganggap anak berkelainan fisik dan mental tak pantas mengenyam pendidikan bersama anak-anak lainnya di sekolah umum-dihapus.”
	25 Januari 2006	Pendidikan Inklusi Juga Terjadi Di Masyarakat	<p>“Pendidikan inklusi selama ini dipahami hanya dilakukan di sekolah. Istilah inklusi yang benar diartikan terpadu. Artinya pendidikan inklusi tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga dilakukan terpadu di masyarakat. Pemahaman yang benar ini menjadi perhatian dalam membuat konsep kebijakan pendidikan inklusi”</p> <p>“perlu penghapusan label bagi anak difabel, kebutuhan khusus, atau cacat dalam pendidikan inklusi. Anak didik cukup disebut anak, tanpa embel-embel difabel, kebutuhan khusus atau cacat” (Prof Moch Sholeh YAI PhD, Kepala Pusat Penelitian Rehabilitasi dan Remediasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)</p>
13	22 November 2006	Mengikis Sekat-Sekat Eksklusivitas Dan Stigmatisasi	“Fahreza salah satu Anak Berkebutuhan Khusus yang menempati satu ruangan kelas bersama puluhan anak normal lainnya...kelakuannya sangat dipengaruhi kondisi psikologisnya. Bahkan, kalau pas kesal, ia suka memukul temannya sampai melempari kaca. Berkat pendidikan inklusi ini, sikapnya mulai bisa dikendalikan” ujar seorang guru pendamping khusus”
14	21 Desember 2006	Mengubah Stigma Kaum Difabel	“ penyandang cacat tidak diperbolehkan bergaul dan bersosialisasi di lingkungannya, serta dikekang seperti laiknya “penjara

			<p>rumah” karena memperlakukan keluarga. Yang lebih parah, kaum difabel dijadikan pemuas nafsu semata. Ketidakmampuan melawan dijadikan bahan pelecehan seksual”</p> <p>“Pada zaman barbar, hidup berdasarkan otot. Siapa yang kuat dialah pemenangnya. Kompetisi hidup ditentukan dengan berduel. Sekarang zaman telah berbeda. Dunia pengetahuan yang menentukan. Keilmuan dan ketrampilan memiliki peranan. Otak dan kreativitas berperan penting”</p>
15	7 November 2007	Anak Berkebutuhan Khusus Belum Nikmati Pendidikan	<p>“untuk sekolah inklusi, pemerintah menyediakan bantuan dana seperti block grand. Bantuan itu untuk membangun fasilitas atau prasarana yang dibutuhkan untuk mempermudah anak-Anak Berkebutuhan Khusus menikmati pendidikan di sekolah itu. Guru pendamping SLB dihadirkan disekolah, terutama di tingkat pendidikan dasar sampai anak-Anak Berkebutuhan Khusus bisa mandiri dalam pembelajaran.”</p>
16	5 April 2008	Masyarakat Cenderung Apatis Terhadap Anak Autis	<p>“banyak anak lahir dengan kondisi autis atau berkebutuhan khusus yang dicap sebagai anak yang tidak mampu atau ekstremnya disebut idiot” (Harian Umum Kompas, 2008)</p> <p>“ autisme adalah kondisi mental yang umumnya terdapat pada anak-anak yang ditunjukkan lewat sikap kurang mampu berkonsentrasi atau fokus, tidak acuh, dan kurang bisa bereaksi secara wajar” (Harian Umum Kompas, 2008)</p> <p>“autisme itu bukan kecacatan, tapi juga bukan anak dengan kondisi kecerdasan luar biasa atau genius seperti anggapan orang. Kondisi autis pada anak pada dasarnya bisa diterapi, sedang lama terapinya bergantung pada berat-ringan kondisinya” (Harian Umum Kompas, 2008)</p> <p>“autis mendapat anggapan sebagai penyakit ‘anak orang kaya’ karena untuk terapi dan sekolahnya mahal”</p>

17	9 Juni 2008	Arah Baru Pendidikan	<p>“pendidikan yang mampu melayani semua anak dalam keragaman dan perbedaan, dengan fokus untuk mengoptimalkan potensi anak secara penuh, kini menjadi kecenderungan reformasi pendidikan yang tengah dikembangkan banyak negara. inilah pendidikan inklusi yang diharapkan menciptakan proses pendidikan yang ramah anak”</p> <p>“ke depan pendidikan inklusi juga bisa menghancurkan eksklusivitas sosial dalam masyarakat”</p> <p>“pendidikan inklusi, khususnya di Asia, tidak hanya bagaimana mengintegrasikan sekelompok anak dalam suatu pendidikan khusus. Perlu difokuskan bagaimana mengembangkan strategi menghilangkan hambatan-hambatan dalam belajar dan sebaliknya semua anak bisa berpartisipasi. Hanya dengan cara ini, kita dapat mencapai pendidikan berkualitas bagi semua” (Sheldon, Biro Pendidikan Regional Asia Pasifik UNESCO)</p>
18	15 Juni 2009	Tidak Ada Anak Bodoh	<p>“padahal, banyak orang tidak tahu latar belakang sejarah tes IQ di antaranya wawasan budaya yang sempit dan rasialis. Saat itu tes IQ digunakan untuk menghambat kaum buruh yang umumnya berkulit hitam masuk parlemen. Di luar negeri SLB sudah mulai dihapus dan diganti dengan sistem pendidikan inklusi”</p>
19	4 November 2009	Pendidikan Inklusi Masih Banyak Kendala, UNESCO Beri Perhatian Serius	<p>Kurikulum pendidikan inklusi harus masuk dalam kurikulum utama dan yang paling penting untuk diubah adalah cara pikir pembuat kebijakan, pendidik, dan masyarakat</p>
20	6 Februari 2011	Mencari Mutiara Dibalik Cangkang	<p>“mempunyai seorang anak autistik tak ubahnya seperti menghadapi kerang besar yang menyimpan mutiara indah di dalamnya”</p>
21	12 Maret 2011	Anak Saya Pernah Diludahi..	<p>“Anak saya pernah di ludahi”</p>

22	3 April 2014	Penerimaan Masyarakat Belum Baik	“masih banyak penyandang autisme menjadi bulan-bulanan di sekolah karena di anggap aneh. Padahal seharusnya dibantu”
	19 November 2016	Hindari Pemisahan : Peraturan Sekolah Inklusif Belum Berjalan Dengan Baik	<p>“ dalam pemikiran pemerintah dan masyarakat masih ada pandangan fragmentaris yang membagi anak dalam kategori normal dan tidak normal”</p> <p>“Anak Berkebutuhan Khusus berhak mendapatkan pendidikan yang sama dengan yang diterima oleh anak tidak berkebutuhan khusus. Namun, prinsip ini tidak bisa diterapkan dengan baik karena di tengah masyarakat masih tertanam kuat pandangan bahwa Anak Berkebutuhan Khusus harus dipisahkan”</p>
23	13 Juli 2019	Sekolah Didorong Terapkan Pendidikan Inklusi	“ABK bukanlah individu yang tidak normal, tetapi spesial”
24	16 September 2020	Penerimaan Terbelah Pada Anak Berkebutuhan Khusus	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih membagi disabilitas menjadi 12 jenis. Adapun Harian Umum Kompas juga membahas bagaimana pandangan dan persepsi masyarakat mengenai penyebab ABK, 33,4 % masyarakat menganggap ABK sebagai penyakit keturunan. 23,01% sebagai takdir Tuhan. 19,29% akibat virus dan bakteri di otak. Bahkan sebagian kecil (0,37%) menyatakan ABK disebabkan oleh gangguan roh halus. Sebanyak 0,37% pula masyarakat membuat standarisasi sendiri mengenai ABK

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Harian Umum Kompas

Harian Umum Kompas pertama kali diterbitkan pada tahun 1965 oleh seorang jurnalistik keturunan Cina. Momen kelahiran Harian Umum Kompas sebagai pers adalah ketika isu PKI hangat diperbincangkan. Harian Umum Kompas terbit bertujuan untuk menentang wacana media massa kiri. Sebelumnya nama Harian Umum Kompas hendak diberikan “Bentara Rakjat” yang nama belakangnya mirip surat kabar corong PKI saat itu. Tetapi nama ini dianggap agak menantang sehingga nama Harian Umum Kompas dipilih presiden Soekarno dengan filosofi petunjuk arah. (Sularto dan Santoso, 2016)

Ide pendirian Harian Umum Kompas diprakarsai oleh Jenderal Ahmad Yani yang kemudian dituangkan dikalangan Partai Katolik, saat itu ada seorang Frans Seda, Ignatius Josef Kasimo, Petrus Kanisius Ojong, dan Jacob Oetama. Kedua nama ini sebelumnya sudah pernah mendirikan majalah bernama “intisari”. Saat itu tidak sedikit orang menyebut Harian Umum Kompas sebagai ‘Komando Pastor’.

Tahun 1980, kepemimpinan Harian Umum Kompas dipegang oleh Jakob Oetama yang membawa kepentingan Partai Katolik. Tetapi setelah Partai Katolik dibubarkan dan menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) akhirnya Harian Umum Kompas berusaha untuk independen dan melepaskan diri dari agama. Harian Umum Kompas kemudian menjadi bacaan seluruh rakyat Indonesia. Harian Umum Kompas pertama terbit hanya dengan empat halaman dan enam iklan dicetak oleh P.N Eka Grafika. Kemudian nama Jakob dan Ojong ditulis sebagai pendiri.

Jakob Utama sendiri adalah murid Oyong dalam banyak hal, pada serial Sejarah Hubungan Harian Harian Umum Kompas dan Kekuasaan, Wijayanto selaku pembicara menyebutkan bahwa Jakob Utama bukan seorang yang berlatar bisnis melainkan wartawan murni. Namun Oyong lah yang memiliki jiwa bisnis dan mengemukakan ide agar tidak hanya bergantung pada Harian Umum Kompas cetak. Akhirnya Harian Umum Kompas melakukan perluasan bisnis dengan membuka cabang usaha lain seperti toko buku, percetakan, hotel, dll. (Forum AES, 2020)

Frans Seda menulis dalam Ishwara berjudul “sepanjang jalan kenangan”. Dia mengatakan bahwa bahwa kelahiran Harian Umum Kompas sama seperti kreatif bisnis yang lain. Ide ini

muncul dari Jenderal Ahmad Yani yang mengatakan bahwa Partai Katolik perlu punya media untuk mengimbangi PKI dan sekutu-sekutunya. (Wijayanto, dalam Forum AES 2020)

Sejarah Harian Umum Kompas tidak lepas dari sejarah ekonomi politik saat itu, dan partai Katolik mempunyai peran untuk kelahirannya. Karena konteks ekonomi politik ini, masalah pertama muncul ketika perizinan Harian Umum Kompas yang sempat mendapat ancaman dari kelompok PKI yang mana saat itu PKI berada di pihak rezim kekuasaan yang bisa mengakui tentang perizinan itu. (Wijayanto, dalam Forum AES 2020)

Saat pertama terbit, sudah ada syarat yang harus dipenuhi Harian Umum Kompas yaitu mampu menunjukkan setidaknya 3000 pelanggan (harus ada pembaca). Kemudian syarat ini dipenuhi oleh Frans Seda yang ingat ada sebuah pulau bernama Flores yang banyak pengikut katolik dan siap menandatangani loyalitasnya. Akhirnya dengan terpaksa sekutu PKI mau tidak mau mengizinkan karena syarat tersebut sudah terpenuhi.

Wacana untuk menandingi Partai Komunis Indonesia dijalankan pada awal penerbitannya, setelah mengumpulkan tanda bukti 3000 pelanggan sebagai syarat izin penerbitan. Dalam situasi politik yang sedang panas, untung tidak bisa diraih. Tidak lama setelah itu tiga bulan pertama setelah terbit terjadi kasus penculikan oleh Ahmad Yani selaku penggagas Harian Umum Kompas. Setelah insiden penculikan Harian Umum Kompas dan seluruh media cetak tidak diizinkan lagi untuk terbit. Tak berapa lama Harian Rakjat yang saat itu menjadi surat kabar corong PKI juga tidak cetak lagi. Diikuti dengan pengangkatan Soeharto selaku kolega Ahmad Yani menjadi presiden di Indonesia dan PKI tidak pernah bangkit lagi (Sularto dan Santoso, 2016)

Peristiwa ini mengubah arah politik. Sejarah mencatat sebagai upaya perebutan kekuasaan terhadap presiden Soekarno. Setelah terjadi insiden penculikan, Harian Umum Kompas tidak boleh terbit dengan alasan mengurangi berita simpang siur tentang pengkhianatan G30SPKI. Sehingga penguasaan terhadap media dianggap penting saat itu.

Setelah pembredelan dicabut Harian Umum Kompas menjadi media yang penting setelah sinar harapan. Meskipun sempat beberapa kali mengalami masalah bredel dan kasus hukum, Harian Umum Kompas dikenal sebagai media yang hati-hati dalam menyoroti pemberitaan. (Nurkholis, 2008)

Nama Kompas yang lahir dari Bung Karno bermakna pemberi arah dan jalan dalam mengarungi lautan dan hutan rimba. Peran Bung Karno disini tidak hanya sebagai pendukung, tapi salah satunya memberi kredit dari penguasa untuk mendapat proteksi dari sana sebagai tameng politik. Karena konteks kelahiran Harian Umum Kompas lahir dari rezim politik otoriter, media saat itu dianggap tidak memiliki kebebasan dalam berdemokrasi. Maka penting bagi media diterima dan disupport penguasa. Nama Harian Umum Kompas pada akhirnya menjadi nama yang pas.

Di edisi pertama Harian Umum Kompas, 26 juni 1965, tertulis dalam artikelnya Jakob Utama sebagai pimpinan redaksi. Namun dalam edisi pertama ini, tidak ada nama PK Ojong sebagai pemimpun umum. Alasannya waktu itu PK Ojong disebut sebagai political outcast. Tulisan-tulisannya di media sebelumnya dinilai kritis dan dapat menjadi sumber bahaya. Sehingga namanya harus disembunyikan untuk menghindari kesulitan perizinan dan pembredelan. Dapat dilihat ada konteks ketakutan dan kontestasi politik dalam kelahiran Harian Umum Kompas. (Wijayanto, dalam Forum AES 2020)

Setelah diberi izin dan terjadi pergantian rezim, Harian Umum Kompas sempat menulis editorial yang berbunyi

“Bung Karno sebagai presiden telah secara resmi memerintahkan pimpinan tertinggi militer untuk bertindak atas namanya untuk menyelamatkan masyarakat, melanjutkan revolusi pancasila dan untuk memastikan keamanan serta wibawa presiden, dan sebagai konsekuensinya kita haru menghormati pemerintah dan mendukung” (Harian Umum Kompas, 1964)

Pernyataan ini dilihat Wijayanto sebagai pola Harian Umum Kompas yang setiap pergantian rezim dan penguasa baru Harian Umum Kompas selalu memberikan support dan dukungan, namun begitu rezim mulai lemah, Harian Umum Kompas baru berani memberikan Bold dan mengkritisi. Saat rezim berganti pada Soeharto, di tajuk yang lain 28 September 1966 Harian Umum Kompas secara implisit menyatakan bahwa Soekarno melakukan kesalahan karena memberi ruang pada PKI. PKI dibiarkan ada karena adanya tafsiran yang salah pada Pancasila. (Wijayanto, dalam Forum AES 2020)

Harian Umum Kompas ketika terbit memiliki rubrik yang diberi nama Harijan Umum Kompasiana. Rubrik ini secara khusus diasuh oleh PK Ojong. Namun di tahun 1971, PK Ojong secara resmi memutuskan untuk berhenti mengisi rubrik tersebut. Hal ini dikarenakan Soeharto mulai menunjukkan gejala otoriterisme. Meski demikian, Harijan Umum Kompas tetap berelasi mesra dengan kekuasaan. Di tahun 1973 Jakob Utama mendapat anugerah “Bintang Maha Putra” dari Soeharto, yang mana saat itu Harijan Umum Kompas juga mendapatkan privilege pinjaman sebesar 250 juta dari bank BNI dibawah jaminan kekuasaan negara yang dinobatkan sebagai ‘state indust capital’ (Wijayanto, dalam Forum AES 2020)

Di tahun 78 setelah Harijan Umum Kompas sempat dibredel selama dua minggu selama 21 Januari sampai 3 Februari 1978 karena memberitakan demo mahasiswa. Namun tidak lama kemudian Harijan Umum Kompas kembali diizinkan terbit dengan syarat meminta maaf dan menandatangani kontrak bahwa Harijan Umum Kompas tidak akan memberitakan sederatan isu antara lain masalah keluarga presiden, kekayaan presiden, dan teman-teman presiden. Kemudian Jakob Utama dalam sebuah acara di Solo mengucapkan terimakasih kepada soeharto atas diperbolehkan terbitnya kembali Harijan Umum Kompas. Setelah itu, dikeluarkan UU Pokok tentang Pers tahun 1982 dan turunnya Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUUP) yang mewajibkan semua pers di Indonesia berbadan hukum. Akhirnya terciptalah PT. Harijan Umum Kompas Media Nusantara dengan dikeluarkannya SK Menpen No.013/SK/Menpen/SIUUP/A.7/1985. (Nurkholis, 2008)

Kemudian dalam perjalanannya Harijan Umum Kompas sempat menciptakan situasi seolah-olah membuat statemen untuk mentrigger soeharto menyatakan kemunduran. Di era SBY Harijan Umum Kompas juga berhasil mendesak SBY untuk membatalkan perppu pilkada langsung. RUU ini sudah dikawal Harijan Umum Kompas sejak 2013. (Wijayanto, dalam Forum AES 2020)

Setelah itu, melihat perkembangan dunia digital yang semakin pesat akhirnya Harijan Umum Kompas online menjadi unit bisnis tersendiri dibawah PT Kompas Cyber Media. Di tahun 2008 portal berita ini melakukan rebranding menjadi Kompas.com

Dalam menulis berita, Wijayanto menyebutkan Harijan Umum Kompas belum mendorong konsolidasi demokrasi di Indonesia untuk lebih progresif. Namun, tidak seperti media yang lainnya, Harijan Umum Kompas tidak melakukan investigasi keberpihakan. Meskipun dalam berita online Harijan Umum Kompas kerap hadir berita yang bermutu rendah, hal ini semata karena

cepatnya akses informasi yang mengharuskan untuk mengejar click bait. Tetapi untuk Harian Umum Kompas cetak sendiri Wijayanto menyebutkan kualitasnya yang paling baik diantara konvergensi Harian Umum Kompas yang lain. Harian Umum Kompas memiliki slogan “amanat hati nurani rakyat”. Hingga saat ini Harian Umum Kompas memiliki pembaca sebanyak 2,25 juta orang.



BAB III

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan

Pada sub-bab ini akan memaparkan bagaimana Anak Berkebutuhan Khusus direpresentasikan dalam Harian Umum Harian Umum Kompas dan bagaimana representasi ini pada eranya membentuk ruang baru dan subjektivitas. Temuan ini berusaha menjawab pertanyaan penelitian, yaitu 1) Bagaimana *subjektifikasi* ABK diwacanakan di Harian Umum Kompas? 2) Bagaimana pengetahuan dalam men-*subjeksi* ABK?

1. Pembentukan Subjek Anak Berkebutuhan Khusus

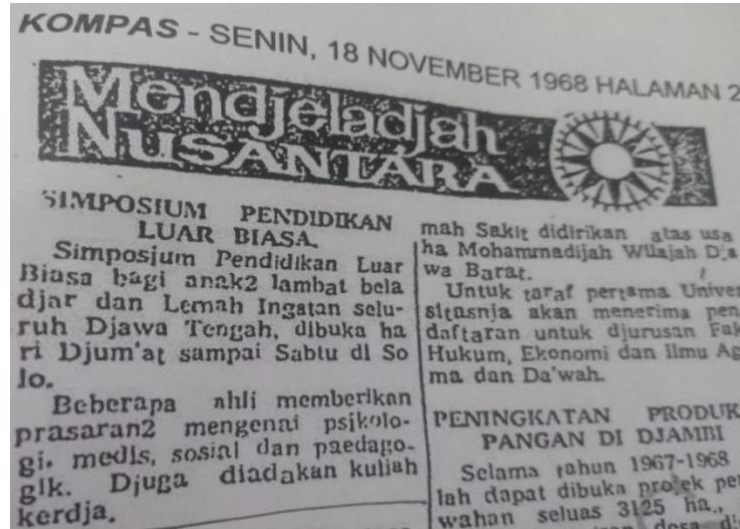
Istilah Anak Berkebutuhan Khusus adalah hasil perjuangan panjang setelah melewati banyak proses mediasi. Jauh sebelum tahun 2000-an, media massa telah mengurai banyak pemahaman mengenai ABK. Pada mulanya ABK dikenal sebagai anak luar biasa, yang mana inilah yang menjadi permulaan pembagian istilah ‘anak luar biasa’ dan ‘anak biasa’. Sub-bab ini akan memperlihatkan bagaimana Harian Umum Harian Umum Kompas membentuk subjek ABK. Analisis dilakukan dengan tiga tahapan cara membuat subjek, yaitu 1) bagaimana *dividing practice* diterapkan, 2) bagaimana *klasifikasi scientific* dijelaskan, 3) bagaimana proses *subjektivikasi* dilakukan

a. Dividing Practice

Di era tahun 90an, Harian Umum Harian Umum Kompas berbicara tentang adanya pengenalan anak yang dianggap berbeda dari anak biasanya, yaitu Anak Luar Biasa. Identitas ini dipisahkan berdasarkan kemampuan anak yang kemudian membelah sekolah. Ada banyak kemunculan istilah yang juga dipahami secara berbeda, semisal anak terbelakang mental, cacat, tunanetra, tuli, bisu, tuna mental, lambat belajar dan lemah ingatan. Lebih dari itu saya akan menjabarkan bagaimana identitas ini dibicarakan.

Di mulai tahun 1968 dalam artikel Harian Umum Harian Umum Kompas *Mendjeladjah Nusantara* terselip satu judul ‘*Simposium Pendidikan Luar Biasa.*’ Kala itu berita tersebut ditulis singkat berbunyi :

“Simposium Pendidikan Luar Biasa bagi anak2 Lambat Belajar dan lemah ingatan seluruh Djawa Tengah, dibuka hari Djum’at sampai Sabtu di Solo. Beberapa ahli memberikan prasaran2 megenai psikologi, medis, sosial, dan pedagogik. Djuga diadakan kuliah kerdja“ (Harian Umum Kompas, 18 November 1968)



Tidak hanya itu, di tahun 1970 kemudian muncul istilah imbeciel dan debiel dalam berita berjudul *inilah tugas Sekolah Luar Biasa*. Berita ini menyebutkan banyak istilah bagi Anak Luar Biasa didalamnya seperti, anak terbelakang, debiel, imbecile, idiot, handicapped, mongoloid, dan anak terbelakang.

“pernah seorang anak jang tadinja diperkirakan terbelakang dikirimkan kesana...”

“ada djuga anak2 jang severeey handicapped...”

“Debiel lebih ringan dari imbeciel, tapi imbeciel lebih ringan dari idiot”

“ibu kepala sekolah menjatakan bahwa anak2 mongoloid khususnja merupakan anak2 jang manis”

Harian Umum Kompas juga menyebutkan bahwa “anak debiel dan imbeciel ada sekolah tersendiri di Djakarta” yang mana disebut sebagai Sekolah Luar Biasa (SLB). Proses pendisiplinan Anak Luar Biasa dilakukan di ruang yang terpisah dengan anak pada umumnya, karena dianggap memiliki kemampuan yang berbeda, sehingga proses pendisiplinannya pun berbeda.

“pada tingkat senso-motoris, anak-anak dilatih menggunakan mata dan tangannya bersama. Umpamanja dengan memberinja dua buah besek, satu berwarna biru, satu merah.

Diberi juga tutup botol berwarna biru dan merah. Seperti sedang bermain2, sianak diminta memasukkan tutup botol merah kebesek merah dan tutup botol biru kebesek biru. Permainan ini tidak boleh lebih dari 15 menit. Mereka beladjar membedakan bentuk mengambil benda2 jang halus dsb” (Harian Umum Kompas, 4 Juli 1970)

“kemudian mereka dilatih untuk berbitjacara. Ada jang karena kecelakaan mengalami kerusakan pada otaknja, tapi bagian otak jang mempengaruhi bitjacara tidak terganggu, sehingga bitjcaranya pandai sekali” (Harian Umum Kompas, 4 Juli 1970)

Dapat dilihat bagaimana klasifikasi anak ini dibagi berdasarkan pemahaman sains medis yang mana penanganannya juga dilakukan secara medis dengan adanya kehadiran subjek dokter dan psikolog dalam sekolah.

Kemudian di tahun 1971, muncul kembali berita berjudul seribu anak tuna mental dan masih di tahun yang sama berita dengan judul sekolah untuk buta, tuli, bisu dengan narasi :

“Kota Tjirebon telah mulai merintis pembukaan Sekolah Luar Biasa bagi mereka jang bisu, buta, tuli, idiot serta lainnya” (Harian Umum Kompas, 18 Agustus 1971)

Tahun 1975, muncul istilah cacat mata dalam pemberitaan berjudul “Sekolah Luar Biasa tunanetra di Bali”. Penggunaan istilah cacat menimbulkan tembok eksklusifisme baru. Sebagaimana dari tinjauan kebahasaan istilah cacat dalam KBBI dimaknai sebagai kondisi ketidaksempurnaan, dan bersifat permanen. Pada framing berita ini ada teks yang kalimatnya seperti berikut

“... Karena itu para guru mendaftarkan muridnya yang cacat mata ini dalam pertandingan 17 Agustus 1973. Tetapi sayang panitia menolaknya bertanding dengan orang yang tak melihat dirasa tak seimbang. Bila menang tidak lucu, bila kalah dengan orang buta tambah enggak lucu lagi” (Harian Umum Kompas, 17 Desember 1975)

Murid yang tidak buta dalam berita ini, dimunculkan sebagai subjek pembanding nasib yang dianggap tak seimbang. Murid yang tidak buta (normal) diposisikan sebagai subjek dengan cara memanfaatkan otoritas eksternal yaitu pengakuan terhadap identitas ketidakbutaannya (kenormalan). Kalimat tersebut menjelaskan bagaimana orang menciptakan batasan-batasan anak cacat mata yang dianggap tidak mampu bersaing dengan anak yang tidak buta.

Pada penjelasan ini ada sekat pembentukan posisi subjek dan objek antara ruang anak cacat dan anak normal. Anak cacat diperlakukan sebagai inertness atau dianggap kekurangan dalam agensi dan aktivitasnya. Disini kehadiran anak cacat dianggap kurang dan terbatas integritasnya sehingga dapat dilanggar sebagai sesuatu yang diizinkan untuk dipecah, dihancurkan, dan didobrak. Konsep perbedaan yang ada pada anak cacat dipandang sebagai suatu yang dapat dinilai secara objektif.

Foucault menjelaskan fenomena ini pembagian istilah ini sebagai bentuk adanya objektifikasi subjek yaitu, *dividing practice* atau pemisahan kemampuan anak. Praktik ini dianggap sebagai bentuk kerja untuk mendominasi yang pada akhirnya akan memarjinalkan mereka dari kelompok masyarakat. Meski dalam teks tersebut tidak terdapat terminologi yang pas dalam mendefinisikan anak cacat tetapi mereka dianggap berbeda. Penjelasan saintifik menyebutkan penyebab perbedaannya, meletakkan anak tersebut dalam kategori pemahaman sains sebagai “subjek yang sakit/penyakit medis”.

Kemudian narasi anak debiel dan imbeciel harus sering dibelai dan punya sekolah tersendiri, membangun konsep bahwa pembagian kemampuan ini meletakkan anak sebagai subjek yang terkotak-kotak, misalnya yang bodoh dan yang dungu, tidak berdaya dan harus dikasihani sehingga harus didisiplinkan dengan sekolah (ruang) tersendiri yang saat itu disebut Sekolah Luar Biasa. Pemisahan dan pembagian kemampuan seperti bodoh, dungu, idiot adalah bukti adanya proses pengelompokkan pada anak yang dianggap berbeda. Menariknya, jika diperhatikan perbincangan Anak Luar Biasa ini selalu mengikuti perbincangan Sekolah Luar Biasa.

b. Scientific Classification

Pembagian dan Pemisahan ALB diklasifikasikan dalam sudut pandang medis. Sebagaimana dalam berita Harian Umum Kompas tahun 1970, menuliskan penyebab imbeciel pada anak yaitu kromosom yang lebih dari satu, pengaruh obat-obatan, kekurangan zat asam, kecelakaan kelahiran sehingga menyebabkan kepala terjepit, terserang meningitis, kecelakaan, dan bahkan disebutkan penyebabnya adalah diserang German Measleef (Harian Umum Kompas, 4 Juli 1970).

Inilah tugas sekolah luar biasa

anak debilitan dan imbecil ada sekolah tersendiri di Djakarta

PEKABUPATEN sebagai ibu de-
stinasinya berarti bagi penduduknya
menjadi berkeadilan. Bahkan anak-
nya juga mendapat perhatian
berkeadilan. Demikianlah yang harus
diusahakan oleh pemerintah, mengingat
jangan bertumbuh sendiri dan ke-
hidupan yang lebih baik dari
negara-negara lain. Pemerintah
tidak hanya berurusan dengan ke-
hidupan, melainkan juga dengan
keadilan.



seorang anak di Djakarta 1 Dulu
mendapat pendidikan yang sama
dengan anak-anak lainnya di
Djember. Sekarang anak-anak
Djember mendapatkan pendidikan
yang berbeda.

tersebut adalah tugas yang harus
diperhatikan, untuk memberi
tempat kepada anak-anak yang
tidak dapat mengikuti pelajaran
di sekolah.

Apakah pendidikan itu untuk
menyediakan tempat bagi mereka
yang tidak dapat mengikuti pelajaran
di sekolah? Ataukah pendidikan
adalah untuk memberi mereka
tempat yang sama dengan anak-anak
lain? Ataukah pendidikan adalah
untuk memberi mereka tempat yang
lebih baik dari anak-anak lain?

Perbedaan antara pendidikan
untuk anak-anak yang normal dan
anak-anak yang tidak normal
adalah pada tingkat kecerdasan.
Anak-anak yang normal memiliki
kecerdasan yang tinggi, sedangkan
anak-anak yang tidak normal
memiliki kecerdasan yang rendah.
Oleh karena itu, pendidikan untuk
anak-anak yang tidak normal
harus disesuaikan dengan tingkat
kecerdasan mereka.

Menyediakan pendidikan untuk
anak-anak yang tidak normal
adalah tugas yang berat. Hal ini
dikarenakan mereka memiliki
kebutuhan yang berbeda-beda.
Oleh karena itu, pemerintah
harus menyediakan tempat
yang sesuai dengan kebutuhan
mereka. Hal ini dapat dilakukan
dengan menyediakan sekolah
khusus untuk mereka.

Inilah tugas...
Membuatkan alat tulis
untuk anak-anak yang tidak
normal adalah tugas yang berat.
Hal ini dikarenakan mereka
memiliki kebutuhan yang
berbeda-beda. Oleh karena itu,
pemerintah harus menyediakan
tempat yang sesuai dengan
kebutuhan mereka.

Perbedaan antara pendidikan
untuk anak-anak yang normal dan
anak-anak yang tidak normal
adalah pada tingkat kecerdasan.
Anak-anak yang normal memiliki
kecerdasan yang tinggi, sedangkan
anak-anak yang tidak normal
memiliki kecerdasan yang rendah.
Oleh karena itu, pendidikan untuk
anak-anak yang tidak normal
harus disesuaikan dengan tingkat
kecerdasan mereka.

Menyediakan pendidikan untuk
anak-anak yang tidak normal
adalah tugas yang berat. Hal ini
dikarenakan mereka memiliki
kebutuhan yang berbeda-beda.
Oleh karena itu, pemerintah
harus menyediakan tempat
yang sesuai dengan kebutuhan
mereka. Hal ini dapat dilakukan
dengan menyediakan sekolah
khusus untuk mereka.

Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Tak hanya itu, kehadiran dokter dan psikolog dalam sekolah menjadi bukti bahwa pengetahuan tentang ALB selalu diletakkan dalam pemahaman sains kedokteran dan psikologi. Klasifikasi sains ini pada akhirnya membawa perbincangan ALB selalu fokus pada penanganan yang tepat bagi mereka. Mulai dari terapi hingga ranah pendidikan. Konsep ALB yang dianggap sebagai penyakit, membuat mereka perlu dirawat dan dipisah agar tidak menjadi gangguan di masyarakat. Kemudian kehadiran dokter, psikiater, dan psikolog membuat ALB seperti objek yang dikaji penawarnya. Mereka dipandang dengan "medical gaze." Konsep ini mengurung manusia menjadi subjek yang dipilah-pilah dan dikategorikan.

Misalnya simposium Pendidikan Luar Biasa pada tahun 1968 yang diberitakan Harian Umum Kompas. Dalam simposium ini ada kehadiran para ahli yang memberikan prasaran mengenai psikologi, medis, sosial dan pedagogik untuk membahas permasalahan pada ALB.

"Simposium Pendidikan Luar Biasa bagi anak2 Lambat Belajar dan lemah ingatan seluruh Djawa Tengah, dibuka hari Djum'at sampai Sabtu di Solo. Beberapa ahli memberikan prasaran2 megenai psikologi, medis, sosial, dan pedagogik. Djuga diadakan kuliah kerdja" (Harian Umum Kompas, 18 November 1968)"

Selanjutnya, tahun 1998 mulai muncul kembali pemahaman Anak Luar Biasa dari sudut pandang medis. Dalam berita kunci keberhasilan autisme terdapat informasi bagaimana anak autisme didisiplinkan dengan sudut pandang kenormalan. Berita ini memunculkan representasi bahwa penyandang autisme adalah anak yang acuh tak acuh bila diajak bicara dan menolak semua jenis

interaksi. Autis dilihat sebagai gangguan perkembangan yang belum diketahui penyebabnya. Penjelasan saintifik dalam berita ini menyebutkan bahwa dari sisi medis ada kekacauan sistem di otak pada anak autis.

Narasi lain yang berisi pendisiplinan anak autis dalam berita ini *adalah “walaupun tidak bisa disembuhkan 100 persen, tetapi penyandang autisme dapat dilatih melalui terapi, sehingga ia bisa tumbuh normal seperti anak sehat lainnya”* (Harian Umum Kompas, 7 Juli 1998). Adapun bentuk pendisiplinan pada anak autis yaitu dijalaninya terapi pemberian obat, terapi wicara, terapi okupasi, terapi perilaku, dan pendidikan khusus. Bentuk pendisiplinan ini dilakukan berulang-ulang dan terus menerus sebagaimana ungkap Dyah, seorang ibu dengan anak penderita autisme membagikan pengalamannya.

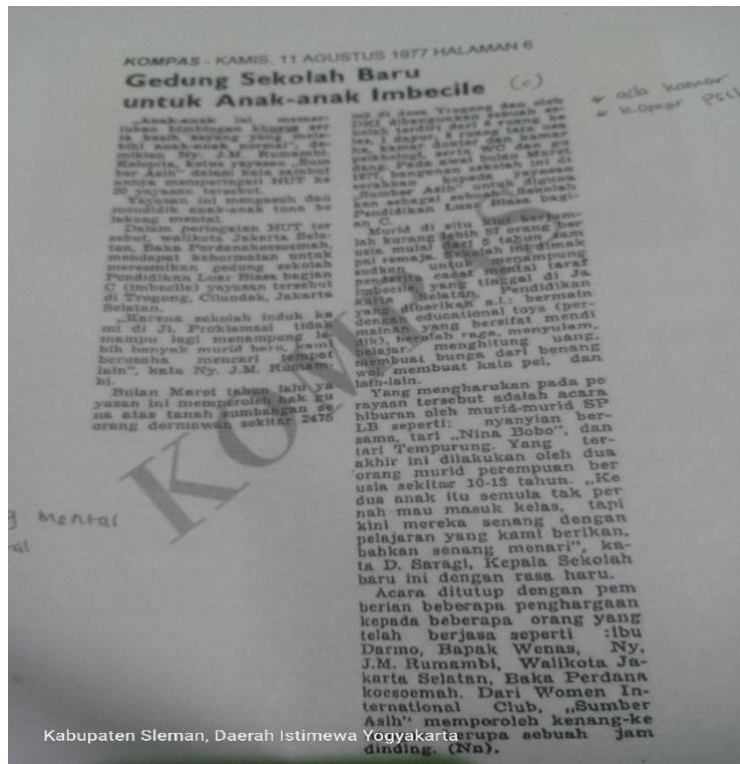
“tidak cukup dan tidak akan berhasil bila kita hanya bergantung pada ahli terapi saja. Orang tua juga harus terjun. Kalau bisa 24 jam sehari. Kalau ahli terapi waktunya sangat terbatas. Anak harus dilatih terus-menerus. Kedengarannya keji. Tetapi ya harus begitu itu” (Harian Umum Kompas, 7 Juli 1998)

Terapi ini adalah menurut Foucault secara praktis juga termasuk bentuk objektifikasi terhadap anak yang berbeda, dimana anak yang berbeda kehilangan otoritas otonomi tubuhnya dengan mengikuti instruksi-instruksi dalam disiplin yang dilaksanakan sesuai standar perilaku yang dianggap normal. Selain itu ahli terapi dalam konteks ini tampil mensubjektifikasikan diri sebagai kediriannya dimana terapis menjadikan dirinya sebagai subjek karena mendapatkan pengakuan sebagai praktisi yang mampu menangani kebutuhan anak yang berbeda.

Kesalahan ini tidak serta merta terjadi melainkan hasil dari pernyataan-pernyataan yang mensubjeksi Anak Luar Biasa di tahun sebelumnya, sebagaimana lahirnya label-label yang tidak humanis, pemisahan, dan pengklasifikasian. Akhirnya ruang komunikasi belum dianggap menjadi solusi, sebab sudut pandang pemahaman tentang ABK masih berbasis medis. Bahkan di tahun 1977 Harian Umum Kompas pernah memberitakan bagaimana gedung sekolah Pendidikan Luar Biasa untuk anak imbecile (dungu) dibangun. Dimana didalamnya terdapat 8 ruang kelas, 1 dapur, 3 ruang tata usaha, kamar dokter dan kamar psikologi, serta WC dan gudang. Jika dibandingkan dengan sekolah saat ini, rasanya akan menjadi asing ketika ada ruang dokter dan psikolog dilingkungan sekolah. Ini membuktikan bahwa ABK masih dianggap sebagai penyakit medis dengan karakter berbeda dan disembuhkan dengan cara yang berbeda serta perlu kepakaran.

c. Subjektifikasi

Lebih lanjut, yang menjadi sorotan kelahiran subjek seperti dokter, psikiater, psikolog, guru bahkan pemerintah mulai menjadi subjek yang berperan penting. Posisi ini pada akhirnya membentuk kelahiran ruang seperti, sekolah, tempat terapi, dan rumah sakit. Adanya ruang kepakaran dokter dan psikolog di SLB pada tahun 1977 dalam Harian Umum Kompas menjadikan SLB sebagai ruang pembeda dengan sekolah pada umumnya.



Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Harian Umum Kompas juga pernah menyorot subjek orang dermawan yang dihadirkan dalam sekolah. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemberian penghargaan kepada orang yang dianggap berjasa seperti ketua yayasan, walikota. Sebagaimana bunyi beritanya

“Bulan Maret tahun lalu yayasan ini memperoleh hak guna atas tanah sumbangan seorang dermawan sekitar 2475 m2...” (Harian Umum Kompas, 11 Agustus 1977)

Pernyataan ini membuktikan bahwa aktivitas kedermawanan sangat identik dengan perlakuan terhadap Anak Luar Biasa. Subjek-subjek yang dibicarakan mempunyai posisi dan peran masing-masing dalam mendefinisikan Anak Luar Biasa. Seperti guru misalnya dibicarakan sebagai subjek yang berperan besar terhadap kemajuan Anak Luar Biasa, karena guru dianggap sebagai media yang memobilisasi perkembangan Anak Luar Biasa.

Harian Umum Kompas pernah menampilkan subjek guru yang berbicara mengenai bagaimana sistem pendidikan punya peran penting terhadap ALB yang pada era tersebut dikenal dengan istilah ABK.

“Fahreza salah satu Anak Berkebutuhan Khusus yang menempati satu ruangan kelas bersama puluhan anak normal lainnya...kelakuannya sangat dipengaruhi kondisi psikologisnya. Bahkan, kalau pas kesal, ia suka memukul temannya sampai melempari kaca. Berkat pendidikan inklusi ini, sikapnya mulai bisa dikendalikan” ujar seorang guru pendamping khusus (Harian Umum Kompas, 22 November 2006)

Selain itu peran lembaga dunia seperti UNESCO yang memberikan perhatian serius terhadap kendala pendidikan inklusi baik dari segi kebijakan, maupun penerimaan masyarakat. Dalam lokakarya “Pendidikan Inklusi Berkualitas bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina dan Timor Leste” yang diselenggarakan oleh UNESCO mengingatkan bahwa : tanpa ada dukungan dari lingkungan positif bagi pendidikan inklusi, maka akan terjadi marjinalisasi di sekolah dan Anak Berkebutuhan Khusus akan tersingkir dari sekolah.

Peran UNESCO sebagai lembaga dunia tampil sebagai subjek yang bermoral dan beretika. Yang senantiasa memerhatikan dirinya, menguji, dan malah memperbaiki dirinya. Ini disebut Foucault sebagai “*Modes of Subjectivation*”

Kemudian di tahun 74 Menteri P & K dalam simposium Pendidikan Luar Biasa, menyatakan bahwa peranan swasta lebih menonjol dibidang Pendidikan Luar Biasa sehingga hal ini dianggap penting dan dirumuskanlah tujuan simposium yang pertama yaitu melakukan identifikasi sekitar situasi Pendidikan Luar Biasa, dan yang kedua merumuskan hubungan kerjasama diantara pihak pemerintah dan swasta (Harian Umum Kompas, 21 Juni 1974)



Foucault memahami peristiwa campur tangan pemerintah sebagai “seseorang yang dapat membentuk, mengatur, menginstrumentalisasi strategi yang dapat dimiliki individu dalam kebebasannya terkait satu sama lain” dalam hal ini subjek menguasai permainan undang-undang dan memanfaatkannya.

Jelas terlihat bagaimana hubungan ruang ini mempengaruhi komunikasi dan interaksi antara Anak Luar Biasa dan anak yang dianggap normal. Ruang memberi pengaruh pada pola dan tingkah laku sosial masyarakat dalam berkomunikasi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Paul C. Adam (2009) yang mana koneksi membahas bagaimana ruang digunakan untuk menjalin sebuah proses komunikasi. Disini SLB menjadi ruang itu dan memiliki pengaruh dalam memahami Anak Luar Biasa. Dalam komunikasi geografi, komunikasi didefinisikan tidak semata-mata sebagai proses transmisi pesan, melainkan sebagai proses produksi spasial (Falkheimer & Jansson, 2006; Adams, 2009; Adams, 2011; Adams & Jansson, 2012). Salahnya komunikasi dalam pernyataan tersebut tidak digunakan menjadi solusi. Sehingga pernyataan batasan ruang tersebut menjadi ambigu.

Masalah keruangan ini pada akhirnya membawa pada perubahan pengetahuan dalam memahami siapa itu Anak Luar Biasa. Perubahan ini dapat dilihat dengan adanya perbedaan istilah yang digunakan, sistem yang dipakai, dan pemahaman yang diketahui. Kajian ini akan di bahas pada subbab selanjutnya.

2. Pengetahuan dalam Subjeksi ABK

Dari hasil pembahasan statemen di Harian Umum Harian Umum Kompas, peneliti membagi hasil menjadi dua periode pemaknaan. Yang pertama, ABK dipandang sebagai charity based dengan pendekatan medis bersifat belas kasihan, dan yang kedua ABK dipandang lebih humanis berbasis pemenuhan hak dengan pendekatan sosial bersifat pemberdayaan.

Fokus sub-bab ini bukan periode pembentukan subjek ABK. Melainkan untuk memaparkan bagaimana pengetahuan dalam periode tersebut berubah sehingga pembentukan subjek, kehadiran objek, dan penggunaan konsep yang digunakan berubah.

a. ABK Charity Based (1968-2000)

Tahun 1968-2000 pendekatan dalam memahami Anak Luar Biasa direpresentasikan dengan adanya sistem Pendidikan Luar Biasa yang mana pada tahun 1968 sudah ada simposium Pendidikan Luar Biasa. Pendidikan Luar Biasa merupakan sistem pemisahan sekolah anak-Anak Berkebutuhan Khusus yang saat itu dianggap sebagai solusi efektif untuk menangani keterbelakangannya.

Periode ini menyematkan banyak istilah pada anak sehingga mereka dikotak-kotakkan berdasarkan jenis kemampuannya seperti, anak keterbelakangan, tuna mental, bisu, tuli, bodoh, dungu, dsb. Pembagian kemampuan ini membuat mereka termarginalisasi dalam lingkungan sosialnya. Selain itu perlakuan ini membuat cara pandang masyarakat dalam memahami anak yang berbeda sebagai sesuatu yang harus penuh dengan rasa belas kasihan. Tak jarang perlakuan terhadap anak yang berbeda ini dalam realitas terkadang memunculkan subjek 'orang dermawan'. Anak yang dianggap berbeda dimediasi sebagai subjek yang memerlukan bantuan dan penanganan medis serta diberi penghormatan dan pemajuan. Landasan dalam memperlakukannya saat itu adalah hati nurani. *"anak terbelakang sebaiknya sering dibelai : anak2 sematjam ini lebih merasakan tjinta kasih dengan belaian bukan kata-kata"* Begitu isi yang dimuat Harian Umum Kompas pada tahun 1970. Isi ini membuktikan bahwa perlakuan didasari oleh perasaan iba dan kata-kata bukan dianggap sebagai solusi perlakuan yang pas. Interaksi dengan anak berbeda dianggap hal yang tabu. Padahal di era selanjutnya masalah komunikasilah yang menjadi poin landasan.

Tidak hanya itu pembagian kemampuan anak ini mengelompokkan mereka dengan sudut pandang medis sebagai subjek yang sakit dan harus dicari penawarnya. Sebagaimana yang tertuang dalam artikel Harian Umum Kompas

" Ada matjam2 hal jang bisa menjebakkan seorang anak menjadi imbeciel mungkin ketika dalam kandungan ibunya diserang German Measleed seperti Puteri Cristine dai Negeri Belanda, mungkin karena chromosomnja lebih satu sehingga djadi anak mongoloid mungkin karena pengaruh obat-obatan sematjam thalidomide, mungkin karena pada saat dilahirkan kekurangan zat asam atau karena sang penolong kelahiran terlalu kuat mendjepit kepalanja, mungkin djuga karena kanak2 itu mendapat ketjelakaan (jatuh ketjelakaan mobil, dsb) terserang meningitis dsb."(Harian Umum Kompas, 4 Juli 1970)

Berbagai istilah dilekatkan pada anak di periode ini. Istilah itu tak lain, debiel, imbeciel, tuna mental, cacat mata, anak terbelakang, mongoloid, handicapped, lambat belajar, lemah

ingatan, tuna belakang mental, dan cacat mental. Belum ada istilah yang ramah pada periode 1968 hingga 1977. Hingga tahun 1970 sebuah berita menyebutkan

“anak debiel dan imbeciel ada sekolah tersendiri di Djakarta”

Kemunculan berita ini menjadi awal terbentuknya pengetahuan bahwa penawar untuk anak-anak yang dianggap berbeda tadi adalah ‘sekolah tersendiri’. Saat itu bernama Sekolah Luar Biasa. Sudut pandang medis yang dominan dibicarakan dan menggolongkan anak pada akhirnya membawa mereka pada pemahaman treatment apa yang pantas dan cocok untuk menawari kecacatan dan penyakitnya, termasuk. Sehingga tak jarang sekolah melibatkan aspek-aspek subjek yang berkaitan seperti dokter dan psikolog untuk kebutuhan terapi. Seperti misalnya kemunculan berita gedung sekolah untuk anak imbeciel yang mana dalam berita tersebut menyebutkan terdapat ruang psikolog dan ruang dokter. Padahal di era saat sekarang akan sangat awam bahwa di dalam sekolah terdapat ruang psikolog dan dokter. Yang mana kedua profesi ini punya institusi tersendiri dan terpisah.

“terdapat 8 ruang kelas, 1 dapur, 3 ruang tata usaha, kamar dokter dan kamar psikologi, serta WC dan gudang” (Harian Umum Kompas, 11 Agustus 1977)

Objek ruang yang hadir dalam berita ini mencerminkan pendefinisian atas subjek anak berbeda sebagai subjek yang sakit. Tak hanya itu pernyataan mengenai perlunya kasih sayang terhadap anak berbeda juga diulang kembali dalam sambutan artikel mengenai gedung sekolah baru ini.

“anak-anak ini memerlukan bimbingan khusus serta kasih sayang yang melebihi anak-anak normal” (Harian Umum Kompas, 11 Agustus 1977)

Lebih dari itu akibat dari adanya pemisahan sekolah dan kemampuan anak ini menyebabkan adanya batasan ruang antar anak yang normal-tidak normal dan bahkan antar anak tidak normal itu sendiri. Akibatnya interaksi dan pola komunikasi masyarakat pun berubah karena perbedaan konteks ruang ini. Hal ini akan membawa perlakuan yang berbeda pada anak yang dianggap tidak normal.

Pemahaman ketidaknormalan muncul melalui klasifikasi ilmiah yang mencoba untuk memahami tiap kemampuan anak dengan penanganan yang berbeda. Misalnya anak debiel dan imbeciel akan berbeda perlakuannya dengan anak buta, tuli, bisu. Pengetahuan medis akan

membawa mereka pada perlakuan yang berbeda. Akhirnya ada ruang tersendiri untuk mereka, termasuk dalam hal ini pendidikan yang dianggap sebagai kunci pembangunan.

Adapun posisi subjek yang dihadirkan dalam sekolah adalah guru yang dermawan, anak-anak yang dianggap normal, psikolog dan dokter. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemberian penghargaan kepada orang yang dianggap berjasa seperti ketua yayasan, walikota. Ada pula subjek orang dermawan yang dihadirkan dalam berita sebagaimana bunyi beritanya

“Bulan Maret tahun lalu yayasan ini memperoleh hak guna atas tanah sumbangan seorang dermawan sekitar 2475 m2...” (Harian Umum Kompas, 11 Agustus 1977)

Pernyataan ini membuktikan bahwa aktivitas kedermawanan sangat identik dengan perlakuan terhadap Anak Luar Biasa. Subjek-subjek yang dibicarakan mempunyai posisi dan peran masing-masing dalam mendefinisikan Anak Luar Biasa. Seperti guru misalnya dibicarakan sebagai subjek yang berperan besar terhadap kemajuan Anak Luar Biasa, karena guru dianggap sebagai media yang memobilisasi perkembangan Anak Luar Biasa dalam Sekolah Luar Biasa. Begitu juga dengan dokter dan psikolog yang diyakini sebagai subjek yang menyembuhkan. Posisi ini pada akhirnya membentuk kelahiran ruang seperti, sekolah, tempat terapi, dan rumah sakit.

Di tahun selanjutnya, proyek pendidikan terpadu tuna netra mulai direncanakan dari tahun 1978-1986 dengan bantuan teknis Hellen Keller Internasional dari Amerika Serikat yang mempunyai dua program utama yaitu pengembangan orientasi dan mobilitas pendidikan terpadu anak tunanetra (Sari Rudiwati, 1981:23). Dalam penggarapan proyek ini orang-orang mulai melihat adanya potensi Anak Luar Biasa bergabung dalam sekolah reguler. Proyek ini menjadi wacana baru dalam pembentukan konsep yang digunakan untuk merepresentasikan Anak Luar Biasa di era selanjutnya.

Dapat dilihat bagaimana pemberitaan Anak Luar Biasa selalu mengikuti perkembangan Sekolah Luar Biasa dibicarakan.

Tahun 1990, terjadi gerakan pembaharuan terkait dunia pendidikan dengan menjunjung konsep ‘education for all’. Konsep ini dicanangkan untuk melanjutkan konsep Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia di tahun 1948 yang mulai membicarakan kesetaraan dan kesempatan akses untuk semua termasuk anak perempuan, anak jalanan dan pekerja, orang miskin, penduduk pedesaan terpencil, minoritas, dan kelompok lainnya dan secara khusus disebutkan para

penyandang cacat. Konsep ini akhirnya mengubah pola sistem pendidikan terpadu di Indonesia yang mengikuti perkembangan dunia. Ditahun ini masalah penyandang cacat mulai dibicarakan dengan sudut pandang pembangunan, terutama sistem pendidikan dan sekolah. Istilah penyandang cacat berganti menjadi kebutuhan khusus pada tahun 1994 yang mana dalam konferensi ini mengusung tema “The Statemen Salamanca and Framework For Action On Special Needs Education (1994)”

Meskipun istilah ini dilekatkan pada pendidikan kebutuhan khusus pada akhirnya istilah ini melahirkan aturan-aturan baru yang mengatur mengenai siapa itu Anak Berkebutuhan Khusus dan bagaimana mereka didefinisikan sehingga merepresentasikan ruang pendidikan yang pas bagi mereka yakni dalam hal ini melahirkan wacana pendidikan inklusi. Dengan adanya pernyataan ini, kemudian di Indonesia lahir UU No. 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat yang condong menempatkan peran anak berbeda sebagai objek yang perlu belas kasihan. Sebagaimana penyandang cacat didefinisikan sebagai berikut :

“ setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari : penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental dan penyandang cacat fisik dan mental”

Tetapi definisi ini (dalam Sholihah, 2016) masih dinilai charity based (bersifat belas kasihan) dan pemenuhan hak penyandang cacat masih dinilai sebagai masalah sosial yang perlu diperbaiki dan diberi kebijakan pemenuhan haknya dengan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial yang mana untuk mewujudkan 3 poin ini didefinisikanlah dengan pemahaman berikut (Jogloabang, 2019):

1. Rehabilitasi yang diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penyandang cacat agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman
2. Bantuan sosial yang diarahkan untuk membantu penyandang cacat agar dapat berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya
3. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan agar penyandang cacat dapat memelihara taraf hidup yang wajar.

Aturan ini jelas tidak lahir dengan sendirinya, melainkan dilatarbelakangi oleh pengetahuan-pengetahuan yang sudah berakar sebelumnya yang setiap saat diulang secara terus menerus kemudian dianggap menjadi cara pandang yang benar. Foucault dalam karyanya

power/knowledge (1972) menyatakan bahwa pengetahuan dan kuasa saling berhubungan untuk melegitimasi kebenaran.

“Kebenaran adalah persoalan tentang apa yang mengatur berbagai pernyataan, dan cara bagaimana pernyataan itu saling mengatur satu sama lain untuk membentuk seperangkat proposisi yang bisa diterima secara ilmiah, dan oleh karena itu bisa diverifikasi atau di falsifikasi oleh prosedur ilmiah.”

Artinya hubungan antara kuasa dan pengetahuan akan melahirkan “kebenaran versi” yang mana dalam hal ini melegitimasi ‘ruang eksklusif’

Bunyi aturan itu juga menyebutkan bahwa kecacatan dianggap sebagai rintangan dan hambatan sehingga subjektifikasi penyandang cacat berhasil menciptakan konsep perbedaan yang representasi ruang koneksi antara anak berbeda dengan anak pada umumnya. Yang mana ruang ini ditandai dengan kelahiran sistem Pendidikan Luar Biasa yang saat itu masih bersifat pemisahan (eksklusif). Sistem ini dipandang dan dianggap tidak humanis karena menempatkan Anak Luar Biasa sebagai objek yang diatur penghidupannya baik oleh hukum negara maupun hukum masyarakat atas dasar perlakuan.

Sistem Pendidikan Luar Biasa juga dianggap melahirkan struktur sosial berupa relasi subjek-objek. Pendefinisian Anak Luar Biasa dalam UU tersebut juga memandang kecacatan sebagai kondisi hambatan yang mengganggu, padahal dalam konteks ini yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang terganggu? Bunyi UU tersebut cenderung bersifat deskriminatif dan tidak akomodatif.

Semua praktik dan aturan ini dinilai sebagai bentuk kerja untuk mendominasi. Dengan kelahiran label-label yang disematkan pada Anak Luar Biasa seperti, penyakit, cacat, kelainan, keterbelakangan, orang yang butuh kasih sayang yang kemudian diperkuat dengan adanya pandangan medis yang mendefinisikan Anak Luar Biasa sebagai anak yang sakit, yang mengelompokkan jenis kemampuannya sebagai penyakit yang harus ditangani dengan penanganan yang berbeda. Kemudian kehadiran subjek-subjek yang dianggap berperan penting seperti, guru, orang dermawan, dan kepakaran seperti dokter dan psikolog. Belum lagi media (dimediasi) memberi pandangan ketidakmampuannya seperti, bodoh, dungu, lambat belajar, lemah ingatan. Adapun aturan dibuat hanya untuk mempertegas posisi Anak Luar Biasa sebagai subjek yang lemah dan perlu diberi perlindungan hukum.

b. ABK Right Based (2000-sekarang)

Di tahun 2000an Indonesia mulai memandang Anak Luar Biasa sebagai bentuk keberagaman. Mulai ada narasi-narasi yang mengkritik pemberian label pada Anak Luar Biasa. Misalnya dalam Harian Umum Kompas di tahun 2002 muncul artikel dengan judul ‘jangan memberi “label” pada anak’. Dalam artikel tersebut menyebutkan bahwa :

“... label-label tertentu pada anak sangat merugikan, meskipun anak itu tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara dengan suara, tidak bisa melihat dengan mata, memiliki cacat fisik atau mental, atau keduanya, juga bila anak bermasalah dengan kecerdasan dan tingkah lakunya. Selain melanggar hak anak, pemberian label-label seperti itu juga melanggar etika” (Harian Umum Kompas, 3 November 2002)

“kekurangan pada anak tidak boleh dilihat sebagai hukuman dari tuhan. Tuhan memberikan kemampuan berbeda-beda kepada setiap anak. Ada yang segini, ada yang segitu, kita harus mengembangkan karunia yang diberikan kepada anak kita, berapa pun besarnya. Bagaimanapun kondisi anak kita, mereka sangat bernilai” (Harian Umum Kompas, 3 November 2002)

Kritik ini muncul untuk mengevaluasi pemahaman pada era sebelumnya yang menggolongkan Anak Luar Biasa dengan label dan memperlakukan anak yang dianggap berbeda dengan tindakan belas kasihan serta menganggap bahwa perbedaannya sebagai nasib. Pemberian label dianggap tidak humanis dan melanggar hak serta etika. Selain itu, kritik dalam berita ini juga menyebutkan bahwa anak yang bermasalah tidak hanya anak yang tidak normal, melainkan juga anak yang normal. Sehingga semua masalah ini harus mampu disesuaikan dengan setiap kondisi dan kebutuhan anak, yang mana saat itu menyebutkan semua anak dapat sekolah di sekolah umum tetapi harus mendapatkan penanganan khusus (normal ataupun tidak).

Lagi dan lagi berita mengenai anak berbeda terus dibicarakan dalam konteks pendidikan. Konsep keragaman ini akhirnya memicu gaungan-gaungan mengenai pendidikan inklusi yang terus disuarakan. Indonesia mulai bergerak memperkenalkan program pendidikan inklusi dengan bantuan teknis dari Universitas Oslo, melalui seminar dan lokakarya. Program ini kelanjutan dari program pendidikan terpadu yang awalnya kurang berkembang dan akhirnya mengikuti pola perkembangan dunia. Ditahun 2002 sudah ada beberapa sekolah rintisan inklusif di beberapa daerah dan untuk memperlihatkan keseriusan pemerintah, tahun 2004 diadakan konvensi nasional yang melahirkan Deklarasi Bandung Tahun 2004 berisi :

1. Menjamin setiap anak berkelainan dan Anak Berkebutuhan Khusus lainnya mendapatkan kesempatan akses dalam segala aspek kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan, keamanan maupun bidang lainnya sehingga menjadi generasi penerus yang handal
2. Menjamin setiap anak berkelainan dan Anak Berkebutuhan Khusus lainnya sebagai individu yang bermatabat untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, tanpa perlakuan diskriminatif yang merugikan eksistensi kehidupan baik fisik, psikologis, ekonomis, sosiologis, hukum, politis maupun kultural.
3. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengelolaan pendidikan inklusif yang ditunjang kerjasama yang sinergis dan produktif antara pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha dan industri, orang tua serta masyarakat.

Di tahun yang sama dengan Deklarasi Bandung, istilah penggolongan anak tidak lagi digunakan atau disematkan pada individu anak. Melainkan berganti menjadi istilah yang lebih general yaitu “anak berkebutuhan khusus” (ABK). Narasi berita di Harian Umum Kompas pun mulai berubah searah dengan kebijakan sekolah inklusi yang mengubah cara pandang masyarakat. Sebuah berita dengan judul “*Masih Terbatas, Akses Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus*” memuat informasi bahwa masih banyak ABK yang belum mengakses pendidikan, dan terdapat pernyataan yang berupa klarifikasi mengenai stigma terhadap ABK. Berikut beberapa statemen yang di ungkap Mudjito selaku Direktur Pendidikan Luar Biasa Departemen Pendidikan Nasional dalam Harian Umum Kompas tahun 2004.

“ masih banyak orangtua yang memilih menyembunyikan Anak Berkebutuhan Khusus daripada memasukkannya ke sekolah. Di sisi lain ada yang terkendala masalah biaya” (Harian Umum Kompas, 9 November 2004)

“terkadang masih ada kekhawatiran kalau ada anak dengan kebutuhan khusus yang masuk sekolah reguler nanti menularkan kelainannya kepada anak lain. Padahal, hal tersebut tidak benar” ungkap Mudjito selaku Direktur Pendidikan Luar Biasa Departemen Pendidikan Nasional” (Harian Umum Kompas, 9 November 2004)

“oleh karena itu peran masyarakat sangat dibutuhkan. Salah satunya adalah dengan program pendidikan inklusi sehingga anak dengan kebutuhan khusus dapat belajar bersama anak sebaya lainnya” (Harian Umum Kompas, 9 November 2004)

Dari narasi diatas pernyataan pertama menandakan bahwa akses sekolah untuk ABK masih terbatas. Pernyataan kedua menandai bahwa sudah ada pernyataan dan klarifikasi terhadap stigma ABK. Dan pernyataan ketiga pemahaman akan ABK mulai berubah dan tidak lagi bersifat eksklusif.

Ketiga makna narasi ini membawa pada kesimpulan bahwa masalah ABK melekat pada intitusi sekolah inklusi. Yang mana dalam hal ini inklusifitas menjadi jalan tengah untuk ABK mendapatkan akses dan hak yang layak.

Kemudian 2005 dilanjutkan dengan diadakannya simposium internasional di BukitTinggi untuk menekankan jaminan bahwa setiap anak benar-benar memperoleh pendidikan yang layak.

Lalu di tahun 2005 muncul pemberitaan tentang *Komitmen Pendidikan untuk Semua* yang mana didalam beritanya menyatakan bahwa *pendidikan inklusif merupakan perwujudan demokratisasi bidang pendidikan dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada tiap warga negara, termasuk penyandang cacat atau mereka yang berkebutuhan khusus.* (Harian Umum Kompas, 4 Mei 2005)

Komitmen ini mempertegas pendidikan inklusif sangat identik dengan pendidikan untuk ABK. Lalu diadakannya simposium internasional di Bukittinggi tahun 2005 dengan tujuan menekan perlunya mengembangkan pendidikan inklusif untuk menjamin anak dengan hambatan belajar agar bisa mendapatkan hak pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas layak.

Saatnya Kikis Kendala Budaya : “Demi pemerataan kesempatan pendidikan pada semua anak usia sekolah termasuk anak berkelainan fisik dan mental, pendidikan inklusi diyakini sebagai solusi jitu di samping terus mengembangkan Sekolah Luar Biasa. Sudah saatnya paradigma sosial budaya yang menganggap anak berkelainan fisik dan mental tak pantas mengenyam pendidikan bersama anak-anak lainnya di sekolah umum-dihapus.” (Harian Umum Kompas, 28 September 2005)

Pemahaman ABK mulai dilihat sebagai kendala budaya yang mana Indonesia adalah negara majemuk yang memiliki banyak keragaman. Maka inklusi dianggap sebagai jalan tengah untuk mengatasi kendala ini, termasuk kendala perbedaan ruang antara anak berkelainan fisik dan mental dengan anak pada umumnya. Disaat yang sama narasi mengenai sikap sosial masyarakat terhadap ABK juga di gaungkan bahwa hambatan utama ABK untuk maju bukan kecacatannya melainkan sikap sosial dan pandangan negatif sebagian masyarakat yang memengaruhi pandangan anak terhadap dirinya sendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan Didi pengajar Ilmu Pendidikan Luar Biasa di UPI dalam Harian Umum Kompas menyatakan bahwa

“selama ada alat khusus, mereka dapat mengatasi hambatan kecacatan itu. Yang sulit hambatan sosial. Hambatan dari dalam diri anak itu sendiri pun umumnya juga disebabkan pandangan sosial yang negatif terhadap dirinya” (Harian Umum Kompas, 7 Februari 2005)

“selama ini, orang membuat dikotomi antara normal dan cacat atau berkebutuhan khusus. Padahal, warga berkebutuhan khusus adalah bagian dari masyarakat juga. Bahkan, terkadang orang tua mereka juga tidak rela melepaskan anaknya ke masyarakat-termasuk lembaga pendidikan umum-karena kekhawatiran” (Harian Umum Kompas, 7 Februari 2005)

“dengan dasar itulah, secara filosofis pendidikan inklusi yang mengajar semua anak secara integral dianjurkan. Dalam artian Anak Berkebutuhan Khusus belajar bersama anak lainnya di sekolah umum. Namun, pendidikan inklusi juga disesuaikan dengan kondisi anak dan kebutuhannya” (Harian Umum Kompas, 7 Februari 2005)

Kemudian berita ini mengusung perlunya penghapusan label bagi anak-anak difabel, kebutuhan khusus, atau cacat.

“perlu penghapusan label bagi anak difabel, kebutuhan khusus, atau cacat dalam pendidikan inklusi. Anak didik cukup disebut anak, tanpa embel-embel difabel, kebutuhan khusus atau cacat” (Prof Moch Sholeh YAI PhD, Kepala Pusat Penelitian Rehabilitasi dan Remediasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)

Narasi penghapusan label ini menjadi bukti bahwa difabel, berkebutuhan khusus, dan cacat berada dalam satu arena pertempuran sosial.

2007 juga muncul pemberitaan yang bertajuk ‘pendidikan’ dengan judul “*Anak Berkebutuhan Khusus Belum Nikmati Pendidikan*” didalamnya memuat pernyataan bahwa masih banyak masyarakat menganggap kecacatan sebagai ‘aib’ sehingga ABK tidak diizinkan untuk mengakses pendidikan. Berita ini juga menjelaskan perkembangan pendidikan inklusi sebagaimana didalamnya dimuat

“untuk sekolah inklusi, pemerintah menyediakan bantuan dana seperti block grand. Bantuan itu untuk membangun fasilitas atau prasarana yang dibutuhkan untuk mempermudah anak-Anak Berkebutuhan Khusus menikmati pendidikan di sekolah itu. Guru pendamping SLB dihadirkan disekolah, terutama di tingkat pendidikan dasar sampai anak-Anak Berkebutuhan Khusus bisa mandiri dalam pembelajaran.” (Harian Umum Kompas, 7 November 2007)

Pendidikan inklusi sudah mulai mendapat respon yang baik dimasyarakat. Dimana pemerintah sudah mulai terjun secara serius untuk menggiatkan dan mengefektifkan pelaksanaan pendidikan inklusi, namun masalah anggaran masih menjadi kendala yang berarti terkait pembangunan fasilitas pendidikan ABK. Sehingga diperkirakan kurang dari 5% ABK yang hanya menikmati layanan pendidikan.

Di tahun 2008 berita bertajuk ‘Kepedulian Sosial’ dengan judul “masyarakat cenderung apatis terhadap anak autis” berita ini mendefinisikan anak autis secara berbeda dengan berita yang ada di tahun 90an. Dalam berita disebutkan bahwa

“banyak anak lahir dengan kondisi autis atau berkebutuhan khusus yang dicap sebagai anak yang tidak mampu atau ekstremnya disebut idiot” (Harian Umum Kompas, 5 April 2008)

“autisme adalah kondisi mental yang umumnya terdapat pada anak-anak yang ditunjukkan lewat sikap kurang mampu berkonsentrasi atau fokus, tidak acuh, dan kurang bisa bereaksi secara wajar” (Harian Umum Kompas, 5 April 2008)

“autisme itu bukan kecacatan, tapi juga bukan anak dengan kondisi kecerdasan luar biasa atau genius seperti anggapan orang. Kondisi autis pada anak pada dasarnya bisa diterapi, sedang lama terapinya bergantung pada berat-ringannya kondisinya” (Harian Umum Kompas, 5 April 2008)

Narasi berita cenderung lebih ramah, pendefinisian autisme tidak lagi dianggap kecacatan. Ada unsur pembelaan yang menggunakan kata ‘kurang’ bukan kecacatan sepenuhnya atau penyakit sehingga narasi sedikit lebih optimis terhadap kondisi ABK. Meskipun begitu, sejak saat itu hingga sekarang fokus pemberitaan ABK terus digiatkan dengan mengarah pada pembangunan konsep pendidikan, yang mana pendidikan inklusi termasuk dianggap penting dan sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia dan dianggap humanis. Inklusi dianggap sebagai jalan tengah atas permasalahan hak ABK. Perubahan konsep ruang ekklusi ke inklusi menjadikan ABK mulai diberi ruang yang sama. ABK dibicarakan dengan konsep inklusi dimana lahir pemikiran baru dalam pendidikan kebutuhan khusus yang awalnya bersifat integrasi berubah menjadi konsep memerangi ekklusi (keterpisahan). Konsep inklusi tidak memandang ABK sebagai bentuk perbedaan melainkan keragaman sehingga inklusi (ketercakupan) dan partisipasi dianggap penting bagi harga diri manusia karena hal tersebut termasuk hal yang harus dimiliki (dijunjung tinggi haknya).

Selain itu pada periode ini, sekolah juga tidak lagi dibicarakan dengan kehadiran praktik terapi, atau ruang dokter. Subjek yang hadir hanya guru. Dan praktik terapi menjadi lembaga tersendiri. Guru menjadi peran utama yang harus memiliki standar kompetensi.

Sudah ada pengetahuan baru yang berbeda dalam memandang ABK. Pendidikan dan ABK adalah satu kesatuan yang diharapkan dapat menciptakan inklusifitas di masyarakat. Sudah ada bentuk pernyataan penolakan atas tindakan-tindakan yang dianggap mendiskriminasi ABK. Sudah ada kelahiran narasi-narasi optimis terhadap kondisi ABK yang dianggap bisa diselesaikan dengan pendidikan. Proses pendisiplinan pendidikan pun mulai berubah dari yang awalnya ABK dianggap

kondisi ketidakmampuan individu berubah menjadi kondisi keterbatasan interaksi yang disebabkan oleh lingkungannya. Sehingga yang perlu diperbaiki adalah lingkungannya. Sudut pandang komunikasi dan interaksi sosial manusia mulai dibicarakan. Hal ini didukung dengan pernyataan wawancara Tolhas Damanik, 2020 :

“Disabilitas itu sekali lagi kalo kita mengacu pada *Convention On The Right Of Persons With Disabillities*, penyandang disabilitas atau kondisi disabilitas bukan berbicara orang nya gituloh, kalo misalnya nanti iin lihat di *Convention On The Right Of Persons With Disabillities* pengertian tentang disabilitas dan yang ada di UU No. 8 Tahun 2016. Disabilitas itu didefinisikan sebagai sebuah kondisi keterbatasan dalam jangka waktu lama yang berwujud pada keterbatasan fisik mental, intelektual dan lainnya. Ada satu kata kunci yang dalam interaksi dengan lingkungan mengalami berbagai hambatan. Artinya apa artinya bahwa kalau kita ingin menggunakan pendekatan pendidikan inklusif untuk membantu penyandang disabilitas maka yang sedang kita selesaikan adalah lingkungannya sebenarnya dalam kata lain bahwa pendidikan inklusif kita lakukan untuk mengatasi berbagai tantangan dari lingkungan terhadap pendidikan anak dengan disabilitas. Jadi kita tidak sedang bicara apakah anak ini layak belajar bisa belajar atau tidak, karena kita sedang berbicara bagaimana kita mentransformasi lingkungan untuk menjadi lingkungan yang ramah untuk mereka”

Tidak habis sampai disitu, proses inklusif memang melalui proses yang panjang sebab istilah penyandang cacat masih digunakan di Indonesia dalam UU. No. 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Dalam beberapa berita masih menyebutkan ABK sebagai anak autis, difabel, dan bahkan cacat. Hal ini menandakan adanya pertempuran istilah yang terjadi dimasyarakat untuk menyebutkan ABK. Seperti dalam berita berikut

“ penyandang cacat tidak diperbolehkan bergaul dan bersosialisasi di lingkungannya, serta dikekang seperti layaknya “penjara rumah” karena mempermalukan keluarga. Yang lebih parah, kaum difabel dijadikan pemuas nafsu semata. Ketidakmampuan melawan dijadikan bahan pelecehan seksual (Harian Umum Kompas, 21 Desember 2006)

Baru setelah 19 tahun UU Penyandang Cacat diganti menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang didefinisikan sebagai:

“ setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”

Peraturan ini sudah mengacu pada UU hak asasi manusia yang berfokus pada pemenuhan hak disabilitas dan mengarahkan disabilitas pada kedudukan subjek yang merdeka tanpa embel-embel objek hukum. Fokus Undang-Undang Penyandang disabilitas tidak hanya berupa

rehabilitasi dan jaminan sosial. Melainkan pemenuhan hak dan kewajiban disabilitas sebagai subjek dengan cara pemberdayaan dan perlindungan sosial (Ratnaningsih, 2016). Subjek dinilai bisa mandiri dengan difasilitasi bukan dimediasi oleh kehadiran subjek yang lain dalam.

Sebelumnya di tahun 2003 pemerintah sudah mengeluarkan UU. No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang mana dalam pasal 5 menyinggung tentang pendidikan khusus bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan untuk menjalankan aturan ini dilahirkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional yang mana termasuk pendidikan inklusi dan Pendidikan Luar Biasa didalamnya. Peraturan ini sudah mengalami dua kali reformasi yaitu, PP No. 32 tahun 2013 dan PP No. 13 Tahun 2015. Tetapi perubahan ini masih bersifat sistem pembelajaran yang tekstual seperti kurikulum, sistem ujian nasional, akreditasi dan belum berorientasi pada pemberdayaan secara ABK secara penuh.

Ditahun 2008 muncul artikel mengenai ‘arah baru pendidikan’ di Harian Umum Kompas. Artikel tersebut banyak bicara mengenai pendidikan inklusi. Dalam statemen nya terdapat pernyataan.

“pendidikan yang mampu melayani semua anak dalam keragaman dan perbedaan, dengan fokus untuk mengoptimalkan potensi anak secara penuh, kini menjadi kecenderungan reformasi pendidikan yang tengah dikembangkan banyak negara. inilah pendidikan inklusi yang diharapkan menciptakan proses pendidikan yang ramah anak” (Harian Umum Kompas, 9 Juni 2008)

“ke depan pendidikan inklusi juga bisa menghancurkan eksklusivitas sosial dalam masyarakat” (Harian Umum Kompas, 9 Juni 2008)

“pendidikan inklusi, khususnya di Asia, tidak hanya bagaimana mengintegrasikan sekelompok anak dalam suatu pendidikan khusus. Perlu difokuskan bagaimana mengembangkan strategi menghilangkan hambatan-hambatan dalam belajar dan sebaliknya semua anak bisa berpartisipasi. Hanya dengan cara ini, kita dapat mencapai pendidikan berkualitas bagi semua” (Sheldon, Biro Pendidikan Regional Asia Pasifik UNESCO)

Setelah narasi-narasi pendidikan inklusi digaungkan, perjuangan terhadap hak ABK tidak selesai sampai tahap ini. Sepanjang tahun selanjutnya mulai banyak framing berita mengenai bagaimana sulitnya penerapan pendidikan inklusi di Indonesia. Banyak kendala mulai dari pengajaran, sisi kebijakan, maupun penerimaan masyarakat. Pembentukan subjek mengenai ABK pada wacana-wacana sebelumnya pada akhirnya bermuara pada tindakan-tindakan bullying pada

anak-anak. Mulai banyak berita yang berisi keluhan orang tua serta mulai banyak pertempuran istilah seperti, autisme, difabel, ABK. Sebagaimana narasi-narasi berikut.

“disamping itu pendidikan merupakan jalan dalam menjajaki kehidupan dunia. Semakin kaya ilmu, semakin dekat hidup yang berarti karena solusi persoalan-persoalan hidup mudah ditemukan. Jangan biarkan potensi yang dimiliki kaum difabel dibiarkan terendap” (Harian Umum Kompas, 21 Desember 2006)

“mempunyai seorang anak autistik tak ubahnya seperti menghadapi kerang besar yang menyimpan mutiara indah di dalamnya” (Harian Umum Kompas, 6 Februari 2011)

“Anak saya pernah di ludahi” (Harian Umum Kompas, 13 Maret 2011)

“masih banyak penyandang autisme menjadi bulan-bulanan di sekolah karena di anggap aneh. Padahal seharusnya dibantu” (Harian Umum Kompas, 3 April 2014)

“Selain itu UNESCO mulai memberi perhatian serius terhadap kendala pendidikan inklusi baik dari segi kebijakan, maupun penerimaan masyarakat. Dalam lokakarya “Pendidikan Inklusi Berkualitas bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina dan Timor Leste” yang diselenggarakan oleh UNESCO mengingatkan bahwa : tanpa ada dukungan dari lingkungan positif bagi pendidikan inklusi, maka akan terjadi marginalisasi di sekolah dan Anak Berkebutuhan Khusus akan tersingkir dari sekolah.” (Harian Umum Kompas, 3 April 2014)

Adapun kesamaan masalah yang dihadapi bahwa masih banyak orang tua yang tidak mau mengirimkan anaknya yang berkebutuhan khusus ke sekolah biasa karena khawatir penolakan dan diskriminasi. Begitupun sebaliknya orang tua dengan anak normal juga tidak mau anaknya satu kelas dengan ABK karena adanya ketakutan terhadap terganggunya proses belajar.

Dalam berita ini pula disinggung mengenai kurikulum pendidikan inklusi yang tidak boleh terpisah karena dapat menciptakan sistem segregasi (eksklusif). Kurikulum pendidikan inklusi harus masuk dalam kurikulum utama dan yang paling penting untuk diubah adalah cara pikir pembuat kebijakan, pendidik, dan masyarakat (Harian Umum Kompas, 2009)

Selanjutnya di tahun yang sama Harian Umum Kompas memberitakan bahwa pengelompokan anak-anak berdasarkan tes IQ tidak lah valid. Informan menyebutkan bahwa bencana besar dalam pendidikan adalah ketika adanya pengukuran kecerdasan menggunakan penerapan tes tertutup (IQ) dan tes ketidakmampuan (tes yang sering menggiring peserta didik menempuh pendidikan di SLB).

“padahal, banyak orang tidak tahu latar belakang sejarah tes IQ di antaranya wawasan budaya yang sempit dan rasialis. Saat itu tes IQ digunakan untuk menghambat kaum buruh yang

umumnya berkulit hitam masuk parlemen. Di luar negeri SLB sudah mulai dihapus dan diganti dengan sistem pendidikan inklusi” (Harian Umum Kompas, 15 Juni 2009)

Di tahun setelah diterbitkannya UU tentang penyandang disabilitas narasi berita di Harian Umum Kompas ikut berubah mengikuti wacana inklusi sebagai filosofi penegakan hak disabilitas. Tahun 2018 muncul narasi dimana disabilitas diberitakan dengan positif, seperti kemampuannya yang sudah bisa mandiri membuktikan bahwa ABK mampu mengembangkan dirinya sendiri. Dalam judul Anak Berkebutuhan Khusus Juga Berhak Punya Masa Depan menceritakan tentang seorang anak autis yang bisa bekerja menjadi petugas satpam sekaligus menjalankan usaha pembuatan keset sampingan.

“Anak Berkebutuhan Khusus juga memiliki cita-cita. Merekapun bisa diarahkan sehingga nantinya mereka bisa merancang masa depannya sendiri” (Harian Umum Kompas, 2018)

“penyandang disabilitas tetap berhak mendapatkan pemenuhan hak-hak mereka untuk hidup layak sebagai manusia” (Harian Umum Kompas, 2018)

Di tahun 2019 dilaksanakan konferensi pendidikan khusus dengan tujuan mendorong sekolah inklusi memperbesar presentase ABK untuk diterima di sekolah reguler agar tidak terjadi diskriminasi, tetapi banyak sekolah yang belum memiliki SDM yang memadai dan tidak memenuhi syarat (Harian Umum Kompas, 13 Juli 2019)

Di tahun 2020 Harian Umum Kompas melakukan kajian mengenai terbelahnya pemahaman masyarakat terhadap ABK. Stigma negatif terhadap ABK masih terjadi di masyarakat. Sebesar 69,39% masyarakat menganggap ABK sebagai anak dengan keterbatasan fisik dan mental, ada juga yang menyebutkan ABK sebagai anak yang berbeda dengan yang lain, dan juga menyebutnya sebagai anak yang unik dan istimewa.

Narasi-narasi ini terus digencarkan untuk menyelaraskan arah pendidikan inklusi yang baik dan benar. Kurikulum terus dievaluasi, pendidikan adalah jembatan untuk menjunjung tinggi hak ABK. Sistem pendidikan yang baik dipandang mampu menyelesaikan masalah sosial ABK yang sering mendapatkan stigma dan mengalami deskriminasi. Namun, kita tidak dapat menutup mata bahwa, ada masalah yang lebih kompleks mengenai kompetensi guru pendamping khusus yang hingga saat ini belum menemukan jalan terang sebagai pelengkap dan kesempurnaan dari sistem pendidikan inklusi. Pemahaman dan pengetahuan mengenai ABK membentuk seluruh sistem

pendidikan inklusi dan diatur serta dirancang sedemikian rupa hingga tercipta gerakan sosial yang membentuk ruang sosial pula.

Di tahun 2020 Harian Umum Kompas melakukan kajian mengenai terbelahnya pemahaman masyarakat terhadap ABK. Hasil menyebutkan stigma negatif terhadap ABK masih terjadi di masyarakat. Sebesar 69,39% masyarakat menganggap ABK sebagai anak dengan keterbatasan fisik dan mental, ada juga yang menyebutkan ABK sebagai anak yang berbeda dengan yang lain, dan juga menyebutnya sebagai anak yang unik dan istimewa.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih membagi disabilitas menjadi 12 jenis. Adapun Harian Umum Kompas juga membahas bagaimana pandangan dan persepsi masyarakat mengenai penyebab ABK, 33,4 % masyarakat menganggap ABK sebagai penyakit keturunan. 23,01% sebagai takdir tuhan. 19,29% akibat virus dan bakteri di otak. Bahkan sebagian kecil (0,37%) menyatakan ABK disebabkan oleh gangguan roh halus. Sebanyak 0,37% pula masyarakat membuat standarisasi sendiri mengenai ABK. (Harian Umum Kompas, 16 September 2020)

Pemahaman dan persepsi masyarakat mengenai ABK seolah menjadi jawaban, bahwa subjektifikasi ABK telah terjadi melalui proses panjang dengan adanya *dividing practice* (pemisahan kemampuan), *scientific classification* (ABK sebagai kajian yang akhirnya diinstitusikan menjadi lembaga), dan *subjectification* (kelahiran kepakaran). Meskipun dalam dua periode pemahaman terdapat konsep yang berbeda dalam memahami ABK, namun keduanya sama-sama masih bersifat mensubjektifikasi ABK, yaitu dengan menjadikan ABK sebagai kajian yang masih tetap diinstitusikan menjadi lembaga.

Dari semua penjelasan diatas sesungguhnya menunjukkan bagaimana orang-orang menggunakan istilah-istilah ketidaknormalan dan mendefinisikannya menjadi ruang baru yang menghadirkan praktik eksklusi maupun inklusi dalam perspektif ruang dan juga perspektif sosial. Semua pernyataan, aturan-aturan dan pengetahuan mengenai ABK sesungguhnya mengarah pada satu kesatuan sistem yang diatur oleh kuasa dalam institusi maupun lembaga sosial. Kehadiran ruang-ruang ini akhirnya melahirkan pertanyaan baru yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Untuk siapakah inklusifitas ini?

B. Pembahasan

Pada pembahasan ini, akan menyinggung kembali secara garis besar apa yang sudah ada ditemukan. Kemudian penulis akan mencoba mendialektikakan temuan terhadap eberapa jurnal, tesis, skripsi, dan tulisan lain yang membahas mengenai ABK. Tulisan-tulisan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana ABK dipahami dalam konteks sosialnya, termasuk dalam proses penerapan belajar mengajar untuk memahami ABK.

Pembentukan subjek ABK menurut Rabinow dibentuk melalui tiga tahapan sejarah yaitu, *dividing practice* yang mengelompokkan ALB berdasarkan kemampuannya, *classification* saintifik yang mencoba memahami ALB dengan pemahaman sains medis dan dianggap sebagai subjek yang sakit sehingga membelah sekolah, serta subjektivikasi yang melahirkan kepakaran-kepakaran seperti dokter, psikolog, guru, bahkan ilmuwan sosial yang mencoba tampil sebagai kediriannya untuk mendefinisikan ALB.

Menariknya perbincangan ALB selalu mengikuti perbincangan mengenai Sekolah Luar Biasa (SLB) yang mana pada era lain terjadi perubahan sistem yang menganggap SLB tidak humanis. Pandangan ini kemudian turut mempengaruhi pengetahuan tentang ALB yang pada akhirnya dikenal dengan istilah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Istilah ABK digunakan untuk menggantikan label-label yang disematkan pada ALB. Istilah ini dianggap lebih humanis dengan pemahaman bahwa setiap anak mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda-beda.

Pengetahuan tentang ABK pun menjadi berubah. Dari yang awalnya dikenal sebagai ALB yang awalnya dilihat sebagai subjek yang sakit, dipisahkan dengan sekolah sendiri (SLB), dan diberi label-label yang lekat pada diri dan kemampuannya menjadi dikenal dengan istilah ABK yang melihat anak pada kendala kemampuan belajar, sehingga sekolah harus bersifat ramah dan inklusi, pandangan ini menuntut perubahan cara pandang hak setiap anak yang juga diikuti dengan aturan sekolah yang berubah dan Undang-Undang pun berubah.

Foucault melihat perubahan pengetahuan ini sebagai kuasa yang produktif. Pengetahuan pada akhirnya membentuk dan mengatur subjek dengan aturan-aturan yang mendisiplinkan. Intitusi seperti lembaga sekolah dalam hal ini akan menjadi faktor yang mempengaruhi pandangan terhadap ABK.

Sebelumnya ada banyak tulisan mengenai ABK. Tulisan pertama oleh Dra. Hj. Sri Widati, M.Pd. (2011) yang menuliskan konsep bina diri bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Dalam tulisannya ia menyebutkan bahwa salah satu kebutuhan ABK adalah bina diri. Bina diri sendiri dimaknai sebagai usaha membangun diri baik secara individu maupun makhluk sosial melalui pendidikan di seluruh aspek sosial sehingga dapat menjadikan seseorang mandiri dan terlibat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain bina diri bagi ABK adalah usaha agar ABK dapat menyesuaikan diri dan mencapai kemandiriannya.

Dalam konteks penelitian ini ABK dilihat sebagai subjek yang tidak bisa mandiri, sehingga harus didisiplinkan dengan norma, aturan, dan nilai-nilai yang dapat diterima oleh lingkungan sekitarnya.

Hal ini sama halnya dengan konsep yang digunakan pada praktik sekolah di tahun 1970 yang mana Anak Luar Biasa waktu itu diorientasikan untuk bisa mandiri dengan orientasi industri seperti bekerja sekedarnya.

“ ... tapi ia bisa diharapkan untuk sanggup mengurus dirinya sendiri, untuk bisa bermain dan juga kelak bekerja sekedarnya, entah jadi tukang jahit, entah bertukang” (Harian Umum Kompas, 1970)

Pernyataan ini juga menganggap ABK tidak bisa mandiri dan juga seolah membatasi hak Anak Luar Biasa untuk mendapatkan kesempatan pekerjaan yang sama dengan anak pada umumnya. Bahkan di dunia pendidikan pada era dulu sudah berorientasi industri, konsep pedagogi seolah diluar kesadaran.

Tujuan-tujuan ini berusaha mengadaptasikan anak dengan lingkungannya. Padahal dalam problem yang sudah dijelaskan diatas yang harus diubah bukan hanya Anak Luar Biasa sebagai subjek yang dipandang tidak mampu, melainkan lingkungannya lah yang harus akomodatif dan juga ikut beradaptasi dalam berinteraksi dengan Anak Luar Biasa. Problem keterlibatan Anak Luar Biasa dalam kehidupan sehari-hari bukanlah problem individu melainkan problem sosial. Dengan kata lain doktrin penelitian ini memfokuskan pada ‘memperbaiki’ individu anak bukan penghapusan hambatan dalam sistem.

Penelitian kedua, yaitu praktik sosial Anak Berkebutuhan Khusus yang mengikuti behaviour therapy oleh Ardianto, 2013. Penelitian ini menarik karena membahas mengenai praktik

sosial Anak Berkebutuhan Khusus, yang mana disimpulkan bahwa selama praktik behaviour therapy ABK dipengaruhi oleh habitus, modal, dan ranah. Ketiga hal ini berkorelasi satu sama lain. Habitus (gerak tubuh) dianggap sebagai kunci adanya reproduksi sosial yang melahirkan praktik pendisiplinan/mengatur individu. Hubungan habitus dan ranah adalah hubungan dua arah dimana habitus mewujudkan struktur ranah, dan ranah memperantarai antara habitus dan praktik. Sementara modal diproduksi oleh habitus (Ardianto, 2013). Dalam hal ini habitus (gerak tubuh) ABK dipengaruhi oleh penguatan yang berupa pemberian sanksi (punishment) dan ganjaran (reward). Sanksi diberikan dapat berupa pengurangan kegemaran, dimarahi, dikurangi hak-haknya, atau bahkan pukulan. Sementara reward dapat berupa pujian, diberikan uang atau permen.

Searah dengan konsep pendisiplinan, subjektifikasi ABK terjadi dalam proses habitus. Dimana ABK didisiplinkan dengan pelatihan dan pendidikan. Pengetahuan akan disiplin terhadap ABK mengubah posisi subjek ABK sebagai objek yang kehilangan otoritas dirinya. Meskipun dari sudut pandang lain, hal ini disepakati karena legalitas keilmiahan, tetapi menurut Foucault dalam Rabinow (1984:7-11) cara manusia menerima atau menjadikan dirinya sebagai subjek atau subjektifikasi adalah ketika manusia mulai sadar dan berbicara tentang etika kebebasan yang ada dalam dirinya sendiri dan dalam praktik therapy behavioral kebebasan ABK tidak dipertimbangkan secara sadar.

Ardianto (2013:12) juga mengatakan bahwa habitus x modal berpengaruh terhadap penciptaan arena/ranah yang pada akhirnya menciptakan kekuasaan. Habitus dapat diartikan sebagai penafsiran untuk memahami realitas. Dalam penelitian ardianto penafsiran terhadap ABK menciptakan praktik kehidupan dengan struktur yang objektif. Selain itu Ardianto menggunakan konsep Bourdeau untuk melihat praktik sosial ABK yang juga dipahami dari sudut pandang modal yang beroperasi dalam suatu ranah/arena. Dalam hal ini modal dibagi menjadi 4, yaitu modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik. Modal ekonomi berupa pendapatan materi dan uang. Modal budaya berkaitan dengan kualifikasi intelektual yang dapat diproduksi dengan pendidikan. Modal sosial berupa hubungan interaksi dan modal simbolik yaitu segala bentuk status/label yang dilekatkan dan juga di legitimasi yang telah terakumulasi dalam satu bentuk sistem. Modal simbolik tidak lepas dari kekuasaan simbol-simbol. Pada akhirnya habitus dan modal menciptakan ranah tempat kekuasaan bertarung.

Ardianto menjelaskan bagaimana praktik sosial terhadap ABK menciptakan ranah pertarungan. Eksistensi ranah pada akhirnya akan menunjukkan kepercayaan aktor-aktor dalam melegitimasi sehingga subyek memiliki legitimasi yang rendah dalam masyarakat.

Menurut Bourdieu (1994:6) dalam konsep penelitian ini praktik sosial menciptakan relasi antara habitus dengan ranah yang keduanya merupakan produk sejarah. Dalam ranah diyakini akan ada pertarungan kekuasaan antar pemilik modal. Modal tidak hanya berupa ekonomi melainkan juga modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik yang terhubung dengan relasi pihak lain yang biasa diproduksi dengan interaksi simbolik.

Konsep ini secara tidak langsung mendukung konsep subjek milik Rabinow dimana orang-orang memproduksi simbol sehingga menciptakan label-label dan pengelompokan yang pada akhirnya menciptakan konsep pemisahan (eksklusi). Simbol ini kemudian merepresentasikan sesuatu yang layak untuk diperjuangkan dan dicari pengetahuannya. Pada akhirnya pengetahuan membuat orang memproduksi makna dari relasi yang dibangun antar subjek-subjek, menjadi subjek-objek. Penempatan makna ini diyakini sebagai sesuatu yang ilmiah dan akhirnya menciptakan ruang yang bersifat otonom dan terdapat perjuangan posisi-posisi untuk mempertahankan kekuasaan.

Penelitian ini menjelaskan bagaimana adanya pendisiplinan terhadap ABK membentuk ruang yang akhirnya menghasilkan modal. Modal disini dinilai sebagai bentuk dominasi (kapitalisasi) baik secara sosial dan ekonomi. Penelitian ini juga mengaminkan pemberitaan-pemberitaan Harian Umum Kompas yang memframing perlakuan komando terhadap anak autis seperti perintah yang berulang-ulang. Narasi yang berisi pendisiplinan autisme dalam Harian Umum Kompas adalah “walaupun tidak bisa disembuhkan 100 persen, tetapi penyandang autisme dapat dilatih melalui terapi, sehingga ia bisa tumbuh normal seperti anak sehat lainnya” (Harian Umum Kompas, 1998). Adapun bentuk pendisiplinan pada anak autis yaitu dijalaninya terapi pemberian obat, terapi wicara, terapi okupasi, terapi perilaku, dan pendidikan khusus. Bentuk pendisiplinan ini dilakukan berulang-ulang dan terus menerus sebagaimana ungkap Dyah, seorang ibu dengan anak penderita autisme membagikan pengalamannya.

“tidak cukup dan tidak akan berhasil bila kita hanya bergantung pada ahli terapi saja. Orang tua juga harus terjun. Kalau bisa 24 jam sehari. Kalau ahli terapi waktunya sangat terbatas. Anak harus dilatih terus-menerus. Kedengarannya keji. Tetapi ya harus begitu itu” (Harian Umum Kompas, 1998)

Terapi ini adalah salah satu bentuk objektifikasi terhadap ABK, dimana ABK kehilangan otoritas otonomi tubuhnya dengan mengikuti instruksi-instruksi dalam disiplin yang dilaksanakan sesuai standar perilaku yang dianggap normal.

Selanjutnya penelitian oleh Kostan & Irwanto yang menjelaskan tentang representasi sosial mengenai siswa disabilitas dan non disabilitas (2017:162). Penelitian menyebutkan bahwa disabilitas diasosiasikan sebagai siswa yang memiliki kekurangan dan cenderung mengarah pada makna yang negatif sehingga kerap mengalami bullying. Searah pula dengan pemberitaan Harian Umum Kompas mengenai pembullying ABK.

“masih banyak penyandang autisme menjadi bulan-bulanan di sekolah karena di anggap aneh. Padahal seharusnya dibantu” (Harian Umum Kompas, 2014)

Bahkan di era ABK dipandang secara Right Based. Kasus-kasus penerimaan masyarakat seolah nihil dihilangkan. Stigma dan hegemoni terhadap ABK sudah terlanjur berakar urat. Maka setidaknya penelitian ini memberikan kesadaran gambaran untuk kembali bermuhasabah sudah sejauh mana ABK dipahami dari konteks sosial dan pendidikannya.

Struktur pengetahuan terhadap ABK masih cenderung mengarah pada makna yang negatif. Pembedaan label yang disematkan seperti, tuna belakang, tuna mental, bodoh, dungu, tidak mandiri, dan tidak mampu, mengarah pada praktik objektifikasi ABK yang menciptakan pendidikan sebagai ruang kunci pembangunan dan pemenuhan hak.

Narasi-narasi dalam memahami ABK terus dibicarakan dalam konteks pembangunan pendidikan. Pada awalnya ABK dipahami dari sudut pandang medis yang saat itu dikenal dengan istilah Anak Luar Biasa kemudian mengeklusikannya pada sistem pendidikan yang dirancang secara khusus (SLB), dengan melibatkan subjek-subjek seperti dokter, psikolog dan guru.

Namun seiring pemahaman Right Based yang menempatkan ABK sebagai subjek yang perlu dilindungi hak nya, bagaimanapun pemahaman ini digencarkan dengan konsep pemberdayaan dan perlindungan sosial, pada akhirnya struktur pengetahuan dengan label-label terhadap ABK masih tetap sulit dihilangkan. Belum lagi pertempuran istilah yang terjadi. Padahal pemahaman right based sebagai filosofi pendidikan inklusi mengarah pada kesadaran nilai-nilai dan keyakinan yang dijunjung tinggi. Manifestasi pendidikan inklusi akhirnya hanya mengarah pada sistem yang sulit memberdaya dan justru menggerus nilai-nilai pemberdayaan dengan

kapitalisasi pendidikan yang mahal dan tidak disertai dengan aturan praktik lembaga dan sosial yang sesuai. Pada akhirnya ruang koneksi yang tercipta hanya menempatkan isu kecacatan pada agenda pembangunan. Hingga saat ini masih banyak kendala pendidikan inklusi, salah satunya kompetensi guru yang belum dirumuskan, kurikulum yang masih banyak belum dipahami konsep penerapannya, yang pada akhirnya menyebabkan praktik pendidikan inklusi masih mengawang dan ABK tetap terdeskriminasi secara sosial.

Kemudian dalam buku Nursyamsi, dkk (2015) dilihat dari perspektif hukum, mendukung adanya kenyataan bahwa terjadi perubahan cara pandang disabilitas dari charity based menjadi social based. Dalam buku ini istilah ABK menggunakan istilah hukum yaitu, disabilitas.

Selain itu penelitian oleh Imamah & Wahyudi (2020) menjelaskan praktik sosial juga dengan konsep Bourdeau. Namun dari sudut pandang perilaku ABK. Yang mana dalam penelitian ini disebutkan bahwa ABK memperjuangkan ranahnya dengan cara menunjukkan keberadaannya agar dianggap siswa yang lain. Penelitian ini juga menyebutkan bagaimana habitus ABK cenderung menutup diri, tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik, dan sulit mendengar perintah guru (Imamah & Wahyudi, 2020)

Masih banyak penelitian yang berfokus pada ABK sebagai individu dan bagaimana mengubahnya menjadi subjek yang bisa disembuhkan atau diterima oleh lingkungannya. Sedikit sekali penelitian yang melihat keluar konteks keterbatasan ABK seperti penelitian Ardianto yang mulai membahas bagaimana praktik sosial bekerja dalam ranah objektifikasi ABK.

Tulisan-tulisan yang ada jarang menjelaskan bagaimana subjektifikasi ABK menghasilkan representasi ruang koneksi. Hal ini yang menjadi pembeda tulisan ini dengan tulisan lain, yaitu konsep komunikasi dalam representasi ruang koneksi yang menjadi wacana subjektifikasi ABK.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Statemen mengenai ABK dalam Harian Umum Kompas sudah ada sejak tahun 1968. Saat itu ABK belum dikenal dengan istilah ABK, melainkan dikenal dengan anak berbeda atau Anak Luar Biasa yang mana setiap anak diberi label berdasarkan kemampuannya. Tahun ini menjadi awal mula bagaimana ABK dipandang dan dipahami sebagai individu yang berbeda sehingga terjadi praktik pemisahan, pembagiaan, pengelompokkan dan pengklasifikasian menjadi beberapa diagnosa dan jenis karakter. Di tahun berikutnya, dengan praktek yang hampir sama, namun ada beberapa perbedaan aktivitas, yang melibatkan penjelasan saintifik dengan berbagai macam posisi kedudukan subjek maupun objek yang ada.

Penelitian ini melihat bagaimana subjek anak berbeda dibentuk dengan pengetahuan yang berbeda. Seperti misalnya di periode pertama, terjadi proses pemisahan, pembagian, pengelompokkan dan pengklasifikasian Anak Luar Biasa menjadi beberapa jenis karakter dan diagnosa. Dalam hal ini Anak Luar Biasa dipandang dari sudut pandang medis “medical gaze”. Dianggap sebagai anak yang sakit dan dikasihani. Kemudian dicarikan penawar atas penyakitnya yaitu dengan kelahiran lembaga institusi seperti Sekolah Luar Biasa yang dianggap sebagai ruang khusus Anak Luar Biasa saat itu. Kemudian juga adanya kepakaran seperti dokter dan psikolog. Periode kedua, pandangan terhadap Anak Luar Biasa mulai berubah. Muncul istilah ABK untuk menyebutkan anak berbeda secara umum dan lebih general. Istilah ini dianggap lebih humanis. Kebutuhan ABK mulai dilihat sebagai bentuk keberagaman bukan lagi perbedaan. Sehingga proses pemisahan dianggap meminggirkan anak dan tidak humanis. Akhirnya filosofi keberagaman diinstitusikan menjadi wacana pendidikan inklusi. Dapat dilihat bagaimana perbincangan ABK selalu mengikuti aturan ruang sekolah dibicarakan.

ABK charity based (1968-2000) adalah periode dimana Anak Luar Biasa dipisahkan menjadi golongan-golongan yang menjadikan mereka objek pengetahuan dengan cara meminggirkan dan memarjinalkan mereka. Periode ini, pengetahuan mengenai anak berbeda lekat sekali dengan label-label seperti, bodoh, dungu, cacat, tuna mental, keterbelakangan. Sehingga pemisahan golongan ini membuat setiap karakter anak dipahami berbeda. Anak Luar Biasa

diperlakukan sebagai subjek yang dipilah-pilah dan dikategorikan. Pengetahuan ini membentuk praktik institusi seperti Sekolah Luar Biasa, yang mana didalamnya terdapat pula dokter, psikiater yang dilegitimasi sebagai subjek yang tampil dengan kediriannya. Pada akhirnya hal ini membuat individu Anak Luar Biasa kemudian dipahami dengan cara meletakkan dirinya dalam pengetahuan ilmiah (sains) sesuai dengan golongannya.

Menariknya, periode ini memperlakukan Anak Luar Biasa sebagai subjek yang perlu dikasihani, dibelai, dan pengutamaan perlakuan yang menjunjung tinggi hati nurani. Aktivitas kedermawanan sangat identik dengan perlakuan terhadap Anak Luar Biasa pada periode ini. Subjek-subjek yang dibicarakan mempunyai posisi dan peran masing-masing dalam mendefinisikan Anak Luar Biasa. Seperti guru misalnya, dibicarakan sebagai subjek yang berperan besar terhadap kemajuan Anak Luar Biasa, karena guru dianggap sebagai media yang memobilisasi perkembangan Anak Luar Biasa. Begitu juga dengan dokter dan psikolog yang diyakini sebagai subjek yang menyembuhkan. Posisi ini pada akhirnya membentuk kelahiran ruang seperti, sekolah, tempat terapi, dan rumah sakit.

Pensubjeksian yang demikian disebabkan karena dominannya pengetahuan dari sudut pandang medis yang menganggap bahwa Anak Luar Biasa adalah penyakit. Ia dianggap berbeda, menyedihkan, tidak mampu berdiri sendiri, penuh duka serta kelainannya dianggap sebagai takdir. Perbedaan dan pemisahan ini dimanfaatkan untuk membuat sekat ruang interaksi. Seperti, misalnya hubungan normal dan ketidaknormalan ditentukan dengan cara pembentukan subjek individu normal dengan membawa embel-embel moral dan etika untuk mendapatkan pengakuan atas kediriannya. Sementara ABK diletakkan sebagai "*object of knowledge*" yang harus ditangani, dibahas, dan dibicarakan terus-menerus agar bisa dicari penawarnya.

Di periode selanjutnya muncul kelahiran istilah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) istilah ini terus dibicarakan bersamaan dengan kemunculan istilah inklusi yang dikenal sebagai pendidikan untuk semua. Konsep pendidikan inklusi adalah penggabungan seluruh anak tanpa memandang apapun hambatan. Istilah inklusi hadir untuk memaknai ABK sebagai bentuk keberagaman, dimana di periode sebelumnya ABK dimaknai sebagai perbedaan. Inklusi lahir karena adanya pengetahuan yang merepresentasikan ABK sebagai subjek yang memiliki hak untuk mendapatkan kesetaraan dilingkungan sosial, termasuk di pendidikan.

Penjelasan saintifik ABK masih membagi jenis kekhususannya secara medis. Tetapi secara praktik sosial tidak lagi digolongkan dalam klasifikasi “berbeda” namun lebih dilihat secara general dimana seluruh ABK dianggap sama dan digabung dalam ruang belajar yang sama dengan anak pada umumnya untuk mendapatkan hak nya. Bukan berarti kemudian ABK dibiarkan untuk belajar sendiri. Akan tetapi semua anak termasuk yang normal mendapat pelayanan sesuai kebutuhan kekhususannya. Subjek dokter dan psikiater tidak lagi terlibat ada di dalam sekolah. Melainkan menjadi institusi tersendiri. Dalam konsep pendidikan inklusi, gurulah yang harus memiliki standar kompetensi mencakup dokter dan psikiater. Bukan sebagai praktik penyembuhannya, melainkan praktik pemahamannya sebagai panjangan tangan dari dokter dan psikiater.

Subjek yang hadir pada periode kedua lebih melibatkan peran orang tua dan masyarakat umum. Menandakan bahwa problem ABK tidak hanya tanggung jawab subjek tertentu. Banyak pula tulisan ilmiah yang menyandingkan ABK menjadi masalah dalam ranah pendidikan bukan lagi medis. Meskipun periode kedua dianggap lebih humanis dengan membawa konsep hak asasi manusia dan kesetaraan kesempatan dengan kelahiran UU baru, tetapi proses subjektifikasi ABK tetap terjadi melalui “scientific discourses”. Hanya saja dengan konsep ruang yang berbeda. Selain itu masih terjadi pertempuran istilah penyebutan antara istilah medis, hukum, dan ranah sosial, seperti autisme, disabilitas, dan ABK.

Permasalahannya sampai saat ini standar kompetensi guru belum dirumuskan secara jelas. Masalah perumusan kurikulum di kementerian juga masih mengalami masa bongkar-pasang. Bahkan sejauh ini pemerintah belum memiliki data ABK secara lengkap. Belum lagi masalah hambatan ekonomi yang mana biaya pendidikan ABK sangatlah mahal.

Right based yang menghadirkan sekolah inklusi hanya memindahkan posisi ABK dari pemahaman medis menjadi pemahaman humanis/sosial. Inklusi adalah filosofi dari kehadiran bersama. Tetapi secara praktik, inklusi terus menempatkan ABK sebagai objek pengetahuan, yang mana dalam hal ini ABK dalam ranah hukum sebagai “subjek yang harus dilindungi haknya”, dalam ranah komunikasi sebagai “subjek yang tidak terhubung di ruang sosial” , dan dalam ranah sosial sebagai “subjek keberagaman”. Inklusi menjadi institusi penawar dari permasalahan itu semua. Pertanyaan baru, untuk siapakah inklusifitas ini?

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah objek yang dikaji terbatas hanya pada berita harian Harian Umum Kompas.

C. Saran/Rekomendasi

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membahas lebih jauh mengenai wacana sekolah inklusi. Studi ini perlu melihat sejauh mana subjektifikasi ABK berperan terhadap perkembangan sekolah inklusi.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adams, P.C. (2009). *Geographies of Media and Communication*. UK : Willey Blackwell
- Falkheimer, J., & Jansson A. (2006). *Geographies of Communication: The Spatial turn in media studies*. Goteborg: Nordicom
- Nursyamsi, Fajri., dkk. (2015). *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
- Rabinow, Paul. (1984). *The Foucault Reader*. New York: Pantheon Books
- Stubbs, Sue. (ed: Didi Tarsidi). (2002). *Inclusive Education Where There Are Few Resources*. The Atlas Alliance
- Sularto, S T & Santoso F. Harianto (2016). *Harian Umum Kompas Way Jacob's Legacy*. Jakarta: Harian Umum Kompas
- Wickham, Gary & Kendall, Gavin. (1999). *Using Foucault Methods*. London: Open University Press

JURNAL

- Ainayyah, Refiana dkk. "Identifikasi Komunikasi Anak Berkebutuhan Khusus dalam Interaksi Sosial," *Jurnal Pendidikan Inklusi*, No. 1 (2019)
- Aprilia, Imas Diana. "Interaksi dan Komunikasi pada Anak dengan Hambatan Majemuk," *Jurnal JASSI_Anakku*, No. 2 (2012)
- Ardianto, Afrillia. "Praktik Sosial Anak Berkebutuhan Khusus yang Mengikuti Behaviour Therapy (Studi Kasus pada Anak Penyandang Autisme di Surabaya)," *Jurnal Paradigma*, No. 01 (2013)
- Bintoro, Totok. "Menyelaraskan Arah Pembangunan Pendidikan Khusus di Indonesia," *Jurnal Perspektif Ilmu Pendidikan*, Vol. 16 (2007)
- Dhona, Holy Rafika. "Analisis Wacana Foucault dalam Studi Komunikasi," *Jurnal Spektrum Komunikasi*, No. 2 (2020)
- Dhona, Holy Rafika. "Komunikasi Geografi," *Jurnal Komunikasi*, No. 1 (Juli 2019)
- Dulisanti, Reza. "Penerimaan Sosial dalam Proses Pendidikan Inklusif," *Indonesian Journal of Disability Studies*, (2015)
- Imamah, Nuril & Wahyudi, Ari. "Praktik Sosial Anak Berkebutuhan Khusus dalam Pelaksanaan Pembelajaran di SMPN 4 Siduarjo," *Jurnal Paradigma*, No. 2 (2020)
- Kebung, Konrad. "Estetika Eksistensi Michel Foucault: Kritik dan Solusi Alternatif atas Radikalisme dan Ekstremisme," *Jurnal Melintas*, No. 1 (2018)

Kostan, Hashella & Irwanto. "Representasi Sosial Mengenai Siswa dengan Disabilitas pada Siswa Non-Disabilitas SMP Inklusi di DKI Jakarta," Indonesian Journal of Disability Studies, No. 2 (2017)

Labuem, Susana. "Proses Berpikir Anak Berkebutuhan Khusus (Slow Learner) di Kelas Inklusi dalam Memecahkan Masalah Matematika," Jurnal Pendidikan Matematika, No.2 (Desember 2019)

Nida, Fatma Laili Khoirun. "Komunikasi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus," Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam, No. 2 (Desember 2013)

Adams, C Paul an Danandre Jasson. 2012. Communication Geography: a bridge between disciplines. Jurnal Online

Rhomadhona, Herfia. "Sistem Pakar Diagnosa Karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus Menggunakan Metode Forward Chaining," Jurnal Sains dan Informatika. No. 1 (Juni, 2017)

Sakinah, Diffany Noriko. "Perilaku Bullying terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusif Kota Padang," Jurnal Penelitian Pendidikan Khusus, No.2 (2018)

Sholihah, Imas. "Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas," Jurnal Sosio Informa, No. 2 (2016)

Zakia, Dieni Laylatul. " Guru Pembimbing Khusus (GPK) : Pilar Pendidikan Inklusi," Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, (2015)

MEDIA HARIAN UMUM KOMPAS

"Simposium Pendidikan Luar Biasa," HARIAN UMUM KOMPAS, 18 November 1968

"Inilah Tugas Sekolah Luar Biasa," HARIAN UMUM KOMPAS, 4 Juli 1970

"Sekolah Untuk Buta, Tuli, Bisu," HARIAN UMUM KOMPAS, 21 Januari 1971

" 1000 Anak Tuna Mental," HARIAN UMUM KOMPAS, 18 Agustus 1971

"Menurut Menteri P & K : Dibidang Pendidikan Luar Biasa, Peranan Swasta Lebih Menonjol," HARIAN UMUM KOMPAS, 21 Juni 1974

"Sekolah Luar Biasa Tunanetra di Bali," HARIAN UMUM KOMPAS, 17 Desember 1975

"Gedung Sekolah Baru Untuk Anak-Anak Imbecile," HARIAN UMUM KOMPAS, 11 Agustus 1977

"Kerjasama Indonesia-Belgia dalam Melatih Guru Anak Cacat," HARIAN UMUM KOMPAS 1 September 1978

"Murid Tunanetra Bisa Naik Kelas Tiga Kali Setahun." HARIAN UMUM KOMPAS, 19 Maret 1980

"Bukan Tunanetra," HARIAN UMUM KOMPAS, 24 Maret 1980

"Wajib Belajar Bagi Anak Cacat Tidak Mudah Dilaksanakan," HARIAN UMUM KOMPAS, 12 Juni 1995

“Kunci Keberhasilan Penyembuhan Autisme,” HARIAN UMUM KOMPAS, 7 Juli 1998

“Wapres: Penyandang Cacat Sering Terabaikan,” HARIAN UMUM KOMPAS, 17 Juli 2000

“Jangan Memberi “Label” Kepada Anak,” HARIAN UMUM KOMPAS, 3 November 2002

“Sikap Sosial, Hambatan Utama Anak Berkebutuhan Khusus,” HARIAN UMUM KOMPAS, 7 Februari 2005

“Komitmen Pendidikan Untuk Semua,” HARIAN UMUM KOMPAS, 4 Mei 2005

“Saatnya Kikis Kendala Budaya,” HARIAN UMUM KOMPAS, 28 September 2005

“Pendidikan Inklusi Juga Terjadi di Masyarakat,” HARIAN UMUM KOMPAS, 25 Januari 2006

“Mengikis Sekat-Sekat Eksklusivitas dan Stigmatisasi,” HARIAN UMUM KOMPAS, 22 November 2006

“Mengubah Stigma Kaum Difabel,” HARIAN UMUM KOMPAS, 21 Desember 2006

“Anak Berkebutuhan Khusus Belum Nikmati Pendidikan,” HARIAN UMUM KOMPAS, 7 November 2007

“Masyarakat Cenderung Apatis Terhadap Anak Autis,” HARIAN UMUM KOMPAS, 8 April 2008

“Arah Baru Pendidikan,” HARIAN UMUM KOMPAS, 9 Juni 2008

“Tidak Ada Anak Bodoh,” HARIAN UMUM KOMPAS, 15 Juni 2009

“Pendidikan Inklusi Masih Banyak Kendala, UNESCO Beri Perhatian Khusus,” HARIAN UMUM KOMPAS, 4 November 2011

“Anak Berkebutuhan Khusus: Mencari Mutiara di Balik Cangkang,” HARIAN UMUM KOMPAS, 6 Februari 2011

“Anak Berkebutuhan Khusus: Anak Saya Pernah Diludahi..,” HARIAN UMUM KOMPAS, 13 Maret 2011

“Penerimaan Masyarakat Belum Baik,” HARIAN UMUM KOMPAS, 3 April 2014

“Hindari Pemisahan: Peraturan Sekolah Inklusif Belum Berjalan dengan Baik,” HARIAN UMUM KOMPAS, 19 November 2016

“Sekolah Didorong Terapkan Pendidikan Inklusi,” HARIAN UMUM KOMPAS, 13 Juli 2019

“Penerimaan Terbelah pada Anak Berkebutuhan Khusus,” HARIAN UMUM KOMPAS, 16 September 2020

MEDIA ONLINE

Tempo. “5 Cara Mencegah Bullying Kepada Anak Berkebutuhan Khusus”.
<https://www.google.com/amp/s/difabel.tempo.co/amp/1105592/5-cara-mencegah-bullying-kepada-anak-berkebutuhan-khusus> (akses: 1/2/2021)

ARTIKEL

Mardhatillah. “Bentuk Perlakuan Diskriminasi Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi SD Negeri 52 Kuranji Kecamatan Kuranji” Skripsi, STKIP PGRI, Sumatera Barat (2018)

Ratnaningsih, Erna. “Pergeseran Paradigma Tentang Penyandang Disabilitas Dalam UU NO. 8 Tahun 2016” Universitas Binus, Jakarta, 2016

Widati, Sri. “Pengajaran Bina Diri dan Bina Gerak. Modul (tahun unknown)

